

**NIKAH MISYAR PERSPEKTIF
SYADDU DZARI'AH**

TESIS

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum (M.H.) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal al-Syakhshiyah)



OLEH:

ARIFIN
NIM. 21890211625

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1441 H. / 2019 M.**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Lembaran Pengesahan

Nama	Arifin
Nomor Induk Mahasiswa	21890211625
Gelar Akademik	M.H. (Magister Hukum)
Judul	Nikah Misyar Perspektif Syaddu Dzari'ah

Dr. Junaidi Lubis, M. Ag
Penguji I / Ketua

Dr. Afiq Budiawan, M.H.I
Penguji II /Sekretaris

Prof. Dr. H. Sudirman. M. Johan, MA
Penguji III

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
Penguji IV

Tanggal Ujian/Pengesahan

31 Desember 2019

PENGESAHAN PENGUJI

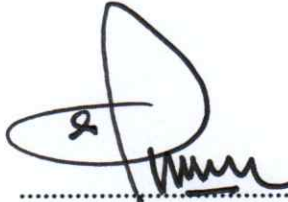
Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **“NIKAH MISYAR PERPEKTIF SADDU DZARI’AH”**, yang ditulis oleh Sdr:

Nama : Arifin
NIM : 21890211625
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)
Konsentrasi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*)

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 31 Desember 2019.

Penguji I,

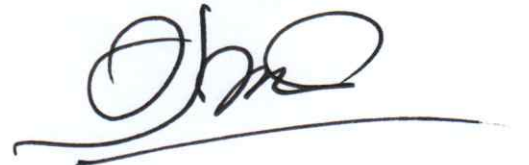
Prof. Dr. Sudirman. M. Johan, MA
NIP. 19530518 198003 1 007



.....
Tgl: 20 Januari 2020

Penguji II,

Dr. Jumni Nelli, M. Ag
NIP. 19720628 200501 2 004



.....
Tgl: 20 Januari 2020

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Junaidi Lubis, M. Ag
NIP. 19670822 199803 1 001
SURAT PERNYATAAN

PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul: **"Nikah Misyar Perspektif Saddu Dzari'ah"**, yang ditulis oleh Sdr:

Nama : Arifin
NIM : 21890211625
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal al-syakhshiyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah diujikan pada tanggal 31 Desember 2019.

Pembimbing I,

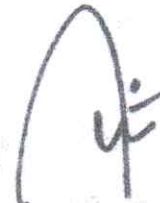
Dr. Helmi Basri, MA
NIP. 19740704 200604 1 003



Tgl: 03 Januari 2020

Pembimbing II,

Dr. Amrul Muzan, MA
NIP. 19770227 200312 1 002



Tgl: 03 Januari 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Junaldi Lubis M.Ag.
Nip.19670822 199803 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini selaku pembimbing Tesis, dengan ini menyetujui bahwa Tesis dengan judul” **NIKAH MISYAR PERSPEKTIF SADDU DZARI AH**” yang ditulis oleh saudara:

Nama : ARIFIN

NIM : 21890211625

Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

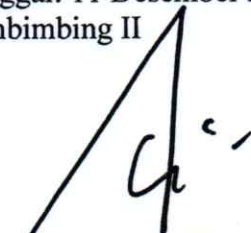
Untuk diajukan dalam sidang munaqasyah Tesis, pada program Pascasarja UIN Sultan Syarif Qasim Riau.

Tanggal: 11 Desember 2019
Pembimbing I



Dr. Helmi Basri Lc. MA.
Nip. 19740704 200604 1 003

Tanggal: 11 Desember 2019
Pembimbing II



Dr. Amrul Muzam S.HI. M.Ag.
Nip. 19770227 200312 1 002.

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



Dr. Junaidi Lubis M.Ag.
Nip. 19670822 199803 1 001

Dr. Helmi Basri Lc. MA
DOSEN PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Tesis Saudara Arifin

Kepada Yth
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu`alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : ARIFIN

NIM : 21890211625

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwalu al Syakhsiyya)

Judul : NIKAH MISYAR PERPEKTIF SADDU DZARI'AH

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu`alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 11 Desember 2019
Pembimbing I



Dr. Helmi Basri Lc. MA.
Nip. 197407042006041003

Dr. Amrul Muzam S.HI. MAg
DOSEN PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal: Tesis Saudara Arifin

Kepada Yth
Direktur Program Pasca Sarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi tesis saudara:

Nama : ARIFIN

NIM : 21890211625

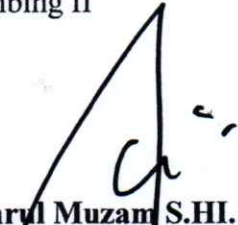
Program Studi: Hukum Keluarga (Akhwalu al Syakhsiah)

Judul : NIKAH MISYAR PERSPEKTIF SADDU DZARI'AH

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pekanbaru, 15 Desember 2019
Pembimbing II



Dr. Amrul Muzam S.HI. M.Ag.
Nip. 19770227 200312 1 002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : A R I F I N
NIM : 21890211625
Tempat/Tanggal Lahir : Indragiri Hulu, 04 September 1975
Program Studi : Hukum Keluarga
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul *"Nikah Misyar Perspektif Saddu Dzari'ah"* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Desember 2019


METERAI
TEMPEL
TGL. 20
8B81CAHF181542571
6000
ENAM RIBURUPIAH
ARIFIN

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas berkat dan rahmat, taufiq dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan Thesis yang berjudul “NIKAH MISYAR PERSFEKTI SADDU AZ ZARI`AH” sebagai kewajiban mahasiswa S2 dalam menyelesaikan tugas akhir. Sholawat dan salam juga tak lupa penulis sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang telah membawa umat manusia dari jalan kemusrikan menuju jaman keimanan dan ketaukhidan.

Dalam menyusun Thesis ini penulis ingin menyampaikan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membimbing dan mengarahkan dalam penulisan thesis ini. Secara Khusus dapat penulis sampaikan:

1. Kepada (Alm) Bapak Surakit dan Ibu Kasmi. Selaku ayah dan ibu yang telah memelihara dan mengasuh penulis dari mulai kandungan hingga penulis dapat menyelesaikan kuliah Program S2 Hukum Keluarga. Sungguh jasanya tiada terkira semoga amalnya diterima Allah SWT. Dan diampuni segala salah dan dosanya.
2. Kepada Rektor UIN SUSKA Riau Bapak Prof. Dr.H.Akhmad Mujahidin M.Ag.yang telah memberikan fasilitas bagi penulis untuk belajar di Pasca Sarjana UIN SUSKA Riau
3. Direktur Program Pasca Sarjana Bapak Prof.DR. Afrizal yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk belajar di Program Pasca Sarjana di UIN SUSKA Riau.

4. Dr.Junaidi Lubis Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga, yang telah menerima judul penulis sebagai bahan dan obyek penelitian.
5. Bapak Dr. Helmi Basri Lc.MA Pembimbing Pertama dan Dr.Amrul Muzam MA Pembimbing Kedua, yang telah bekerja keras dan meluangkan waktunya untuk membimbing demi kesempurnaan dalam penulisan thesis.
6. Kepada Bapak H.A.Karim M.Pd.I Selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu yang telah memberikan izin ini kepada penulis, untuk belajar di Program Pasca Sarjana UIN SUSQA Riau.
7. Kepada Isteri tercinta Eri Kurniati S.Pd. dan Anak-anak yang telah memberikan dukungan besar untuk belajar sehinga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
8. Kepada seluruh teman-teman di Program Pascasarjana, sebagai mitra diskusi, teman-teman kantor yang telah membantu dan mensuport dalam penulisan thesis ini.

Akhirnya kami berharap semoga Tesis yang saya tulis ini bisa bermanfaat untuk kalangan akademisi di Program Pasca Sarjana UIN SUSQA dan masyarakat umunya.

Penulis

A R I F I N S.Ag.

DAFTAR ISI

Lembar pengesahan pembimbing	
Lembar pengesahan Pembimbing	
Lembar persetujuan	
Kata rPenganta	
DAFTAR ISI	i
TRANSLITERISASI	vii
ABSTRAK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LatarBelakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. RumusanMasalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
E. Metodologi Penelitian.....	11
H. Penelitian Terdahulu	15
G.Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PERNIKAHAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Pernikahan.....	19
B. Dasar hukum Pernikahan.....	26
C. Syarat dan Rukun Nikah.....	29
D. Hak dan kewajiban suami isteri.	39
E. Bentuk Pernikahan yang larang.....	39
e.1.Nikah Sighar.....	39
e.2.Nikah Tahlil.....	42
e.3.Nikah Mut`ah.	46
BAB III	

SADDU AZ ZARIAH

A. Pengertian Saddu Zaria`h	42
B. Rukun Saddu Dzari`ah.....	46
C. Dasar Hukum Saddu Dzari`ah	47
1. Al Qur`an..	47
c.2. Sunnah.....	50
c.3. Kaidah Hukum.....	52
c.4. Logika.	52
D. Macam-macam.....	53
E. Pendapat Ulama Tentang Saddu Dzari`ah	57

BAB IV

NIKAH MISYAR

A. Latar belakang nikah misyar.....	59
B. Pengertian nikah misyar	61
C. Syarat dan Rukun nikah misyar	66
D. Pendapat Ulama tentang nikah misyar..	68
d.1. Ulama yang membolehkan.....	76
d.2. Ulama Yang Melarang	80
d.3. Ulama yang tidak melarang dan juga tidak menyuruh.	
F. Nikah Misyar Perspektif Saddu Zari`ah.	86
e.1. Menimbang nikah misyar.....	86
e.2. Nikah misyar manfaat dan madharat..	89
e.3. Aqad dalam nikah misyar.....	92
e.4. `Illat hukum dalam nikah misyar.....	95
e.5. Nikah misyar halal atau haram	98
e.6. Melanggar prinsip pernikahan.	102

e.7. Melanggar UU no.1 1974.....	106
----------------------------------	-----

e.8. Hikmah nikah misyar.	113
--------------------------------	-----

BAB.V PENUTUP

A.Kesimpulan..	119
---------------------	-----

B.Saran-saran.....	121
--------------------	-----

Daftar Putaka

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. *Konsonan Tunggal*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	ẓet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	ẓet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka

ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
هـ	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulish

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis denganh.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila *ta'marbutah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah* ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fîṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	A Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	A Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	I Tafşîl
4	Dammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	U Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزاهلي	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذَوِ الْفُرُوضِ	Ditulis	Zawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

ABSTRAK

Nikah *misyar* adalah salah satu bentuk istilah atau model yang baru dalam pernikahan, karenanya perlu pemikiran dan pandangan yang luas untuk mensikapinya terutama bagi ulama dan pengambil kebijakan di Indonesia. Dikalangan para ulama terjadi kontroversi ada yang menyetujui dan ada pula yang menolak. Diantara yang menyetujui adalah DR. Yusuf Qardawi. Pendapat dan pandangannya ditulis dalam sebuah buku yang berjudul ***Zawajul Misyar hakikotuhu wa hukmuhu***. Nikah *Misyar* adalah pernikahan dimana seorang istri diperkenankan untuk melepaskan sebagian hak-haknya mendapatkan kepada suami. Pernikahan ini dalam pelaksanaan terpenuhi dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syari`at. Jika kita lihat praktek nikah misyar ini banyak menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik dampak positif maupun dampak negatif, antara kemaslahatan dan kemafsadatan . Saddu Dzari`ah merupakan satu metode istimbat hukum dalam Islam yang mengkaji tentang masalah dan mafsadat suatu perbuatan, apakah halal atau haramnya suatu perbuatan.

المخلص

زواج المسيار هو شكل من أشكال مصطلح أو نموذج جديد في الزواج ، لأنه يحتاج إلى أفكار ووجهات نظر عريضة للتصدي له ، خاصة بالنسبة للباحثين وصانعي السياسات في إندونيسيا. بين العلماء كان هناك جدل ، وافق البعض ورفض البعض. وكان من بين من وافقوا الدكتور يوسف القرضاوي. تم كتابة آرائه ووجهات نظره في كتاب بعنوان زواج المسيار حققته وحكمه . زواج المسيار هو زواج حيث يُسمح للزوجة بالتخلي عن بعض حقوقها في الوصول إلى زوجها. هذا الزواج يتوافق مع الشروط والانسجام التي تحددها الشريعة. إذا نظرنا إلى ممارسة زواج المسيار ، فإن هذا سيكون له الكثير من التأثيرات على المجتمع ، سواء الآثار الإيجابية أو السلبية ، بين التبشير والتفسيرات. سد الزرعة هو وسيلة للالتزام القانوني في الإسلام الذي يبحث في المصلح والمفسدات من العمل ، سواء كانت قانونية أو غير قانونية.

ABSTRACT

Misyar marriage is a form of a new term or model in marriage, because it needs broad thoughts and views to address it, especially for scholars and policy makers in Indonesia. Among the scholars there was controversy, some agreed and some refused. Among those who agreed were Dr. Yusuf Qardawi. His opinions and views were written in a book called *Zawajul Misyar hakikatuhu wa hukmuhu*. Misyar marriage is a marriage where a wife is allowed to give up some of her rights to get to her husband. This marriage is in fulfillment with the conditions and harmony that have been determined by the Shari'ah. If we look at the practice of misyar marriage this has a lot of impacts on society, both positive and negative impacts, between proselytizing and interpretative. Saddu Dzari`ah is a method of legal observance in Islam that examines the *maslahah* and *mafsadat* of an action, whether lawful or illicit an action.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah SWT. Sang pencipta, telah menciptakan makhluk hidup, secara berpasang-pasangan termasuk manusia, dari jenis laki-laki dan juga perempuan. Mereka hidup dan tinggal disuatu tempat, maka ia diperintahkan untuk saling mengenal¹ serta saling melindungi antara satu dengan yang lainnya. Setiap manusia menginginkan suatu ketenangan dan kebahagiaan di segala bidang dan di setiap waktu. Seperti kebahagiaan dalam ibadah, karir, politik dan yang tidak kalah pentingnya adalah kebahagiaan dalam berumah tangga. Kebahagiaan dalam berumah tangga hanya bisa dan mampu dirasakan setelah melalui proses pernikahan yang benar.

Ketertarikan manusia terhadap lawan jenisnya merupakan kodrat dan ketentuan ilahi yang merupakan fitrah yang dibawa sejak lahir ke dunia. Oleh karena itu ketertarikan dengan lawan jenis tersebut harus disalurkan dengan jalan yang ma'ruf berdasarkan syari'at Islam yaitu melalui ikatan pernikahan yang benar. Secara sederhana kita dapat memahami bahwa pernikahan merupakan konsep yang sederna, yaitu menyatukan dua orang yang berlainan jenis dengan suatu ikatan tertentu dengan syarat dan rukun tertentu saja.²

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang agung yang merupakan fitrah manusia yang didalamnya terdapat hikmah dan pelajaran yang bisa diambil, selain

¹ QS. Al Hujarat ayat 11. يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ
 Hai sekalian manusia, sesungguhnya Aku telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal.

² Mardani, *hukum perkawinan islam di Dunia Islam Modern* (Jogjakarta: graha Ilmu, 2011), h. 5

itu nikah adalah sarana yang mulia dalam memelihara kontinuitas keturunan manusia serta memperkuat hubungan antar sesama untuk mencapai mengapai cinta kasih dan kebahagiaan. Menggapai rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*.³

Sebelum Islam datang praktek pernikahan banyak terjadi penyimpangan sehingga ada yang diligitimasi oleh Islam dan juga ada yang di hapuskan dan diharamkan untuk di praktekkan. Dari Urwah sesungguhnya `Aisyah ra . memberitahukan pernikahan pada masa jahiliah itu ada empat macam. *Pertama*; Pernikahan seperti yang belakuk sekarang ini, yaitu seseorang laki-laki meminang kepada walinya, kemudian membayar mahar lalu menikahinya. *Kedua*; Pernikahan *Istibdha* yaitu pernikahan antara laki-laki dan perempuan, dan setelah menikah suami memerintahkan isterinya berhubungan badan dengan laki-laki lain yang dipandang terhormat karena bangsawan dengan maksud mendapatkan anak yang memiliki sifat yang terpuji seperti yang dimiliki bangsawan. Setelah isterinya hamil maka ia akan diambil kembali dan bergaul layaknya suami dan isteri. *Ketiga* Pernikahan *al Rahthu* yaitu pernikahan poliandri yaitu perkawinan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki. Setelah hamil dan melahirkan perempuan itu mengundang laki-laki yang pernah mengaulinya, lalu ia menentukan siapa ayah dari anak tersebut. *Keempat*; Pernikahan *Khadam* yaitu pernikahan antara seorang laki dan perempuan secara sembunyi-sembunyi tanpa ada akad nikah yang sah (Menyimpan selir). Hal ini dianggap yang biasa dan

³QS. Ar Rum 21. “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supayamu cenderung dan merasa tentram kepadanya , dan dijadikannya diantaramu rasa cinta dan sayang.Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir”

bukan suatu kejahatan selama dilakukan secara diam-diam. Selain keempat macam tersebut juga ada istilah nikah *Badal*⁴ dan *al Maqthu*⁵

Setelah Islam datang ada juga muncul praktek-praktek pernikahan yang awalnya di bolehkan akan tetapi akhirnya di larang, akan tetapi ada juga beberapa macam bentuk pernikahan yang masih di perdebatkan dikalangan ulama. Diantara jenis pernikahan tersebut adalah nikah *Tahlil*⁶ nikah *Mut`ah*⁷ dan *Syighar*.⁸

Beberapa bentuk pernikahan yang digambarkan di atas sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat jahiliyah pada masa itu. Dimana pada masa itu orang-orang memandang sangat rendah derajat kaum wanita. Mereka memandang keberadaan seorang wanita adalah aib bagi keluarganya, maka dengan mudah mereka merendahkan kaum wanita, wanita tidak obahnya hanya sebuah benda yang bisa digunakan apa saja dan kapan saja.

Perkembangan zaman telah merubah bentuk pola kehidupan manusia . termasuk perilaku manusia itu sendiri. Pada dahulu wanita hanya berperan sebagai ibu rumah tangga . Mereka merasa tabu bahkan masih dilarang untuk beraktifitas didepan publik. Hal ini jauh berbeda dengan kondisi wanita saat zaman sekarang.

⁴ Nikah badal yaitu pernikahan yang dilakukan dua orang suami yang bersepakat tukar menukar isteri tanpa melalui talak.

⁵ .Nikah maqthu yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dan ibu tirinya. Sudah menjadi tradisi bangsa Arab sebelum Islam ada bahwa anak laki-laki mewarisi secara paksa isteri-isteri bekas ayahnya, jika anak laki-laki yang mewarisi itu masih kecil, keluarganya dapat menahan isteri itu sampai anak tersebut dewasa

⁶ Nikah tahlil yaitu nikah seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya, lalu laki-laki tersebut mentalaknya dengan maksud agar suaminya yang dulu bisa menikahinya. Nikah ini haram hukumnya berdasarkan hadits nabi. *لن رسول الله صلى الله عليه وسلم* (Hadits Shahih. HR.Abu Daud no.2076, at Tirmizi no.1119, Ibnu Majjah no.1935) *المحل والمحل له*.

⁷ Nikah mut`ah adalah nikah seseorang yang dibatasi oleh waktu tertentu, satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun atau lebih. *امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة* . (HR. Muslim no.1406) *ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها*.

⁸ Nikah syighar yaitu seseorang yang berkata”Nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu atau berkata”Nikahkanlah aku dengan saudara perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudara perempuanku dengan dirimu. *لا شغار في الاسلام* (HR.Muslim no.1415 dari ibnu Umar radhiyaallahu anhuma.)

Dimana perempuan sudah banyak yang berperan di depan umum (publik), mereka bekerja dan memiliki karir yang cemerlang, mereka memiliki penghasilan yang besar, mereka mampu menafkahi dirinya. Mereka tidak lagi mengandalkan nafkah dari suami atau orang tuanya. Sehingga tanpa mereka sadari mereka lupa akan dirinya untuk melakukan pernikahan. Inilah yang disebut kaum awanis⁹ sebagaimana yang diungkapkan Yusuf Qardawi.¹⁰

Melihat kondisi kaum awanis diatas, secara psikologis pada dasarnya mereka tidaklah merasa nyaman dalam hidupnya, mereka merasakan ingin mendapatkan pendamping hidup. Dan secara biologis tentu mereka juga ingin menyalurkan naluri seksualnya dan mereka takut terjerumus keperbuatan zina¹¹. Kenyataan inilah yang menyebabkan muncullah istilah *Pernikahan¹² Misyar¹³*.

Nikah misyar bukanlah sesuatu yang baru, akan tetapi menjadi sesuatu yang baru di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Praktek nikah misyar telah banyak di praktekkan di berbagai negara khususnya Timur Tengah seperti Qatar dan Afrika dan bahkan telah dilegalkan di Arab Saudi.

⁹ Kaum awanis yaitu: (1) Wanita-wanita yang melajang sampai usia tua, yang telah lewat masa untuk melakukan pernikahan (2) Wanita-wanita yang masih hidup dengan orang tua mereka, dan mampu memenuhi kebutuhan fitrah dalam membangun sebuah keluarga dan menjadi seorang ibu.(3) Wanita-wanita yang mengalami perceraian.(4) Janda yang ditinggal mati suaminya, sedangkan ia memiliki harta yang banyak.(5) Wanita-wanita karier, berkarya dan bekerja seperti menjadi guru, instruktur, dokter, apoteker, pengacara atau profesi lainnya yang berpenghasilan tetap.

¹⁰ Yusuf Qardhawi ,”*Zawajul Misyar Haqiqotuhu wahukmuhu*” terj Adi Irfan jauhari, *nikah misyar (Nikah Lawatan)* (Bekasi: Noen, 2005) h. 12

¹¹Amru Yusuf, *Isteri Rasulullah Contoh teladan*,(Jakarta: Gema Insani pers,1997)h.28

¹²Istilah Pernikahan sama dengan istilah Perkawinan.Berdasarkan UU no.1 1974 Bab 1 ayat 1 menyebutkan Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.

¹³Misyar adalah salah satu bentuk pernikahan dimana pihak isteri melepaskan beberapa haknya kepada suaminya seperti dalam pemberian nafkah dan tempat tinggal. Suami bisa meninggalkan isterinya kapan saja sehendak hatinya.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa salah satu tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan ketenangan hidup dalam rumah tangga . Dan salah satu cara untuk mendapatkan ketenangan hidup tersebut adalah mereka berdua ditempatkan dalam satu tempat tinggal yang sama (satu rumah). Dengan kata lain jika ada sepasang suami dan isteri tidak berkumpul dalam satu rumah, bahkan hidupnya terpisah sendiri-sendiri, maka akan sulit untuk mengapai dan mewujudkan atau bahkan rasanya tidak akan terwujud tujuan pernikahan tersebut.

Di sisi yang lain kita juga mengenal istilah hak dan kewajiban suami dan isteri. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, mereka memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan. Apa yang menjadi kewajiban suami adalah hak dari isteri demikian juga apa yang menjadi kewajiban isteri adalah hak dari suami.

Jumhur ulama menyatakan Seorang suami wajib baginya memberi nafkah lahir dan bathin kepada isterinya,¹⁴ seorang suami wajib memberikan mahar, dan tempat tinggal. Dan karenanya suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari isterinya. Begitu sebaliknya seorang isteri juga berkewajiban untuk melayani suaminya secara maksimal, disamping dia berhak mendapatkan nafkah , kishwah dan tempat tinggal.

Kondisi tersebut di atas tidak terjadi dalam praktek pernikahan misyar, dalam praktek nikah misyar tidak ada kewajiban nafkah isteri, tempat tinggal dan yang lainnya yang tampak oleh kita hanya mengutamakan hubungan biologis atau seksual saja. Dengan kata lain, seorang suami tidak dituntut untuk membayar

¹⁴Mardani, *Hukum perkawinan Islam di dunia Islam Modern* , (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011),h.18

mahar, nafkah, kiswah dan tempat tinggal dan lain sebagainya, melainkan dia hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan biologis isteri saja.

Di dalam perkawinan suami juga berkewajiban untuk memberikan atau menyediakan tempat tinggal, serta memikul segala beban biaya yang di butuhkan oleh isteri dan anak. Pemberian nafkah adalah mutlak kewajiban suami. Nafkah yang wajib ditanggung suami ada tiga macam yaitu sandang, pangan dan papan. Besar kecilnya nafkah tergantung pada keadaan kedua belah pihak.¹⁵ Oleh karena itu suami yang baik tentu akan selalu memberikan dan melaksanakan kewajibannya dengan baik. Sebab hal inilah yang mampu menambah rasa cinta dan kasih sayang kepada isteri, menambah kebahagiaan, dan menambah kesetiaan. Bahkan dari semua itu suami bisa memberikan hadiah kepada isteri

Menjadi tanda tanya besar apakah nikah misyar sebagai solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan khususnya kaum awanis atau bahkan sebaliknya, akan menimbulkan persoalan baru dalam hukum *al akhwalu as Sahsiyah*. Disisi lain para ulama masih berbeda pendapat dalam menghukumi nikah misyar tersebut. Ada yang menolak dan menghukumi haram dan ada juga yang membolehkan dan menghalalkan.

Suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara sadar pastilah mempunyai tujuan yang jelas, terkadang tanpa mempersoalkan apakah perbuatan yang dituju itu baik atau buruk, mendatangkan manfaat atau madharat.¹⁶ Sebelum sampai pada perbuatan yang dituju ada serentetan perbuatan yang mendahuluinya dan harus dilalui.

¹⁵Muhammad Jawwad al Mughniyah, *Fikih lima mazhab*, terj. Afif Muhammad (Jakarta: Lentera Basri Tama, 2001) h.76

¹⁶Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994) h.135

Dalam persoalan nikah misyar disatu sisi syarat dan rukun terpenuhi secara syari`at. Akan tetapi sebagian lain tidak tercapai tujuan pernikahannya. Sehingga diperdebatkan dikalangan ulama tentang keabsahan kehalalannya dan keharamannya. Bagi yang membolehkan dan menghalalkan beralasan untuk menyelamatkan dari perbuatan zina. Tetapi bagi yang melarang beralasan bahwa pernikahan bukan hanya terpenuhi syarat dan rukun saja tetapi tujuan (*maqasid*) harus juga tercapai.

Untuk mengkaji persoalan tersebut, penulis akan menggunakan *Saddu Dzari`ah* untuk menganalisisnya. Dengan menggunakan *Saddu Dzari`ah* maka akan diketahui tentang keabsahan praktek nikah misyar, apakah sesuai dengan syari`at atau bertentangan, apakah banyak manfaat atau banyak madharatnya.

Perbuatan-perbuatan pokok yang dituju oleh seseorang telah diatur dalam syari`at dan termasuk dalam hukum taklifi yang lima atau yang disebut *al Ahkam al Khamsah*. Keharusan untuk melakukan atau menghindari perbuatan yang mendahului pokok tersebut, ada yang telah diatur sendiri hukumnya oleh syara` dan ada yang tidak diatur secara langsung.¹⁷

Syaddu Dzari`ah terdiri dari dua kata yaitu *Saddu* dan *Dzari`ah*. Kata *Saddu* menurut bahasa berarti menutup, penghalang, hambatan atau sumbatan. Sedangkan *dzar`iah* secara bahasa berarti wasilah atau jalan kesuatu tujuan. Secara bahasa *Saddu Dzari`ah* yaitu menutup jalan atau *wasilah* (media) yang

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta; Jkarta Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 160

mengantarkan kepada suatu tujuan atau menghambat atau menghalangi atau menyumbat semua jalan-jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.¹⁸

Pengertian *Dzar'iah* sebagai wasilah dikemukakan oleh Abu Zahrah dan Nasrun Haroen mengartikannya sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa sesuatu yang dilarang dan mengandung kemadharatan. Sedangkan Ibnu Taimiyyah memaknai *Dzar'iah* sebagai perbuatan zahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan.¹⁹

Dari gambaran diatas terdapat beberapa persoalan hukum yang harus dijawab dalam nikah misyar ini terutama tentang maslahat dan madharat yang akan timbul dalam pernikahan misyar ini, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti persoalan tersebut dalam penelitian dalam bentuk thesis dengan judul” NIKAH MISYAR PERSPEKTIF SADDU DZARI'AH”

B. Identifikasi Masalah

Dalam penelitian penulis merumuskan beberapa permasalahan diataranya adalah: Apa illat hukum kuat dalam menetapkan hukum nikah misyar?

- a. Apakah nikah misyar halal atau haram?
- b. Nikah misyar maslahat atau madharat?
- c. Dalil manakah yang lebih kuat diantara yang melarang atau yang membolehkan?
- d. faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya nikah misyar?
- e. Apa dampak maslakhat dalam pernikahan nikah misyar?

¹⁸Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004) h.113

¹⁹Ummu Isfaraoh Tiharjanti, *Penerapan Saddu Zara'i terhadap Penyakit Genetika Karier Resesif dan Perkawinan Inbreeding* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijag, 2003) h.27-28

- f. Apa dampak sosiologisnya dalam nikah misyar?
- g. Bagaimana status anak yang dilahirkan?

C. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah yang telah penulis gambarkan maka dirumuskanlah masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana hakekat Pelaksanaan nikah misyar?
2. Bagaimanakah hukum nikah misyar dalam Perspektif Sadd Dzari'ah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam melakukan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dalil-dalil dalam menetapkan dalam nikah misyar.
- b. Untuk mengetahui kedudukan hak isteri dalam nikah misyar.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya nikah misyar
- d. Apa madharat yang ditimbulkan dengan dihalalkannya nikah misyar

Adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini mencakup dua aspek, yaitu sebagai berikut:

e.1. Secara Teoritis

- a. Sebagai wahana pengkajian ilmu dan untuk memperkaya khazanah hukum Islam tentang nikah *misyar*.
- b. Sebagai gambaran dan paparan awal mengenai dampak madharat dalam nikah *misyar*.
- c. Memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum keluarga mengenai nikah *misyar*.

2. Secara Praktis

- a. Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi positif dalam Prodi Hukum Keluarga kedepan, dan menjadi salah satu cara untuk mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi UIN SUSQA.
- b. Sebagai bahan acuan berbagai pihak dalam merumuskan kebijakan strategis yang terkait dengan kajian yang dipaparkan, supaya masyarakat mengerti macam-macam solusi dalam menyelesaikan permasalahan mengenai pernikahan, khususnya nikah *misyar*.
- c. Sebagai bahan pertimbangan atau referensi tambahan dan bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya dengan topik yang sejenis untuk menyempurnakan penelitian dan mengembangkan keilmuan lebih lanjut.
- d. Sebagai salah satu tugas akademik untuk mendapatkan gelar Magisterr Hukum di Universitas Sultan Syarif Qasif program paska sarjana Riaru.

E. Metode Penelitian

e.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library reserch) yaitu penelelitian yang dalam pembahasannya mencari dan mengumpulkan serta menelaah atau menganalisa dari beberapa buku ilmiah dan literatur serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan nikah misyar sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini.

e.2. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi tiga yaitu

sumber data primer, sumber data skunder dan tersier. Data yang dimaksud adalah data-data atau naskah yang berkenaan dengan pelaksanaan nikah misyar yang meliputi manfaat dan madharatnya, larangan dan kebolehannya.

e.3. SumberiData

a. Data primer,

Yaitu sumber data atau naskah yang memberikan informasi langsung terhadap masalah yang diteliti dari sumber yang pertama.²⁰ Adapun yang menjadi sumber utama yakni:

Pertama kitab Yusuf Qardawi, *Zawajul Misyar Haqiqatuhu wa Hukm Wahumuhu*. Kedua, Buku Yusuf Qardhawi *Min Hady al Islam: Fatawa mu`sirah*.

Kedua;Jurnal hukum Islam yang membahas tentang nikah misyar di antaranya adalah: dengan berjudul “ *Fatwa Ulama tentang Hukum Nikah Misyar Perpektif Maqasid al Syari`ah* karya Choim Tohari yang dimuat dalam jurnal al Tahrir. Penelitian ini mengkaji beberapa pendapat ulama dari perspektif maqasid Syar`iah dalam mempertimbangkan hukum yang aspek manfaat dan kerusakannya yang ditimbulkan.²¹

Ketiga;Jurnal yang ditulis oleh Moh. Nurhakim yang berjudul “ *Tinjauan Sosiologi Fatwa Ulama Kontemporer Mengenai Status Hukum Nikah Misyar*” Jurnal ini membahas tentang fatwa nikah misyar yang diperdebatkan oleh para ulama dari sudut sosiologi masyarakat. Dalam kesimpulannya bahwa

²⁰Ahmad Anwar, *Prinsip-Prinsip Metodologi Research*, (Yogyakarta: Sumbangsih, 1974),h.2

²¹Chomim Tohari” *Fatwa Ulama Tentang Nikah Misyar Perspektif Maqasid Syar`iah At Tahrir, Jurnal Pemikiran Islam* (Ponorogo : STAN Ponorogo press 2011) yang selanjutnya akan digunakan dengan sebutan Thori, Fatwa.

nikah misyar itu banyak menimbulkan dampak buruk dan fitnah di tengah masyarakat.²²

Keempat; Penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli yang berjudul "*Misyar dalam Pandangan Hukum Islam*" Pada penelitian ini penulis memaparkan tentang hukum-hukum nikah misyar yang dikemukakan oleh para ulama dan terutama Yusuf al Qardhawi terutama dalam kitabnya *Zawajul al Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu*. Selain tentang hukum nikah misyar juga disebutkan tentang latar belakang terjadinya nikah misyar. Pada kesimpulannya penulis menyebutkan bahwa nikah misyar itu tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam karena terdapat penyimpangan. Nikah misyar juga tidak mendukung tercapainya maqasid syar'iyah dari pernikahan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah warahmah.²³

b. Data Sekunder

Yaitu data-data yang berfungsi menunjang data utama atau sumber utamanya. Data sekunder merupakan kitab-kitab fiqh, tafsir karya para ulama serta literatur lainnya yang berhubungan dengan nikah *misyar*

c. Data tertier

Yaitu data yang memberikan informasi secara tidak langsung, tetapi memiliki kaitan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Seperti kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

²²Moh.Nurhakim, Khairi Fadli" Tinjauan Sosiologis Fatwa Ulama Kontemporer Mengenai status Hukum nikah misyar" e-journal Umum. Vol Juli-September 2011

²³ Sebuah Skripsi yang ditulis mahasiswa Program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah UIN Syarif Hidayatullah pada tahun 2011.

e.4. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data dan beberapa naskah yang cukup dari beberapa referensi dan dokumentasi (naskah) dan dianggap memadai maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan naskah (data)

Pemeriksaan data ini bermaksud memilah data-data atau naskah-naskah yang sudah terkumpul apakah sudah benar atau belum, apakah sudah sesuai dengan materi yang sedang di teliti.

b. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data bertujuan memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis data dan sumber yang diambil (buku referensi), pemegang hak cipta, (nama penulis tahun penerbit), dan halaman dan penulisan identifikasi masalah, lalu setiap masalah diberi tanda A. Masalah kedua diberi tanda B dan selanjutnya diberikan tanda. Jika dia merupakan buku yang dijadikan sumber atau referensi maka akan ditulis nama penulis, tahun penerbit dan halaman. Jika itu perundang-undangan catatan terdiri dari nomor ayat, pasal dan nomor tahun dan nama atau judul undang-undang. Tanda atau catatan dapat ditulis dibawah halaman berupa catatan kaki (*footnote*).²⁴

c. Merekonstruksi data

²⁴ Muhammad Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Graia Indonesia, 2002) h.56

Merekonstruksi data yang dimaksud adalah menyusun kembali data atau naskah-naskah yang telah dapat secara teratur dan tersusun sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.²⁵

d. Mensistimatisasi data

Maksudnya adalah menyusun data secara sistematis dengan cara menempatkan naskah atau data tersebut menurut kerangka sistematikanya bahasan berdasarkan rumusan masalah.

Tahap selanjutnya setelah data didapat maka dilakukan analisis data dengan menggunakan *content analysis* yaitu sebuah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan data yang dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁶

F. Penelitian Terdahulu

- a. Ahmad Subail jurusan *al Akhwalu as Syahsiah* UIN Sunan Kalijaga tahun 2013, dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap nikah Misyar. Berdasarkan analisis hukum Islam disimpulkan bahwa nikah *misyar* tidak sesuai dengan tujuan perkawinan islam karena terdapat penyimpangan didalamnya sehingga menjadikan sulitnya terwujud mawaddah warahmah diantaranya: *yang pertama* tidak adanya nafkah, yang bertentangan dengan surat at-Talaq ayat 7 dan surat al-Baqarah ayat 233, begitu pula hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim tentang kewajiban nafkah kepada istri begitu juga dalam KHI pada pasal 80 ayat 4. Yang kedua, nikah *misyar* ini pun tidak dicatatkan yang mana bertentangan dengan surat al-

²⁵ Witarto, *Memahami Pengelola Data*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008) h.39

²⁶ Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, tahun 1992), h.26

Baqarah ayat 282 dan KHI pasal 5 ayat 1. Yang ketiga, dalam nikah *misyar* pula seorang suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan tempat tinggal bagi istri yang mana ini merupakan inti dari nikah *misyar* yang mana hal ini sangat bertentangan dengan surat at-Talaq ayat 6 yang mewajibkan seseorang menyediakan tempat tinggal.

2. Harisatul Mukaromah NIM: 210111094, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, Program Studi al Ahwal al-Syakhshiyah STAIN Ponorogo, Skripsi 2016, *Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf Al-Qardawi*.²⁷ Penelitian ini terfokus kepada bagaimana pandangan aktivis gender ponorogo dalam menyikapi pandangan Yusuf Qardawi mengenai nikah *misyar*. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode *field reseach* (penelitian lapangan). Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa hukum nikah misyar sebagaimana yang dikonsepsikan oleh Yusuf Qardawi adalah boleh, pernikahan ini memenuhi segala rukun dan syaratnya. Hanya saja, sang istri merelakan beberapa haknya tidak terpenuhi oleh suaminya. Sedangkan menurut pendapat aktivis gender Ponorogo hukum nikah *misyar* ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak. Alasan tokoh gender yang memperbolehkan adalah kalau syarat dan rukunya pernikahan sudah terpenuhi. Sedangkan menurut tokoh gender yang tidak memperbolehkan misalnya secara syarat dan rukunnya sudah sah akan tetapi

²⁷Harisatul Mukaromah, *Pandangan Aktivis gender Ponorogo Terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardawi*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.

dari aspek moral tidak etis. Sedangkan implikasi dari adanya nikah misyar yang dikonsepkan Yusuf Qardawi ini jelas bertentangan hukum perkawinan di Indonesia, karena dalam konsep nikah *misyar* tidak adanya pencatatan perkawinan, sedangkan dalam konsep hukum perkawinan di Indonesia perkawinan dianggap sah apabila dicatatkan, upaya dalam mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan.

3. Ahmad Subail NIM: 08250081, jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyiah fakultas Syaria`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, skripsi 2013, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah *Misyar* (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardawi Tentang Nikah *Misyar*).²⁸
4. Jurnal Islam yang ditulis oleh Lili Hanafiah, dengan judul “*Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Syari`ah syeikh Nurjati Cirebon*” Dalam kesimpulannya disebutkan bahwa banyak para dosen Syariah yang tidak setuju dengan peenghalalan nikah misyar.
5. Yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah tentang obyek penelitiannya yang menitik beratkan pada dampak negatif (mafsadat) yang akan ditimbulkan dalam praktek nikah misyar lalu dianalisa berdasarkan *Saddu Dzari`ah*

G. Sitematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan thesis ini maka disusunlah sitimatika penulisannya sebagai berikut:

²⁸ Ahmad Subail, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Terhadap Fatwa Yusuf AlQardawi Tentang Nikah Misyar)*, Al-Ahwal Al-Syakhsyiah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2013.

Bab I. Pendahuluan Mencakup diantaranya latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan teknik penulisan, penelitian terdahulu.

Bab II. Kerangka teoritis yang meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami isteri, tujuan pernikahan, bentuk-bentuk nikah yang larang.

Bab III. Tinjauan tentang Saddu Zariah, meliputi pengertian, Kedudukan Saddu Zariah sebagai sumber hukum, dasar hukum Saddu Zariah yang meliputi al Qur'an, Sunnah, Kaidah Hukum dan Logika, pendapat ulama tentang saddu zari'ah`

Bab IV. Tinjauan tentang Nikah Misyar yang meliputi: Latar belakang nikah misyar, pengertian nikah misyar, rukun nikah misyar, pendapat ulama tentang nikah misyar, nikah misyar berdasarkan maqasid syariah, perspektik nikah misyar yang meliputi: mempertimbangkan nikah misyar, manfaat dan madharat, nikah misyar bebas biaya, nikah misyar melanggar prinsip al Qur'an dan nikah melanggar UU perkawinan.

Bab V. Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran, serta dimuat daftar pustaka memuat buku-buku yang dijadikan sebagai dasar teori dan rujukan dalam penulisan.

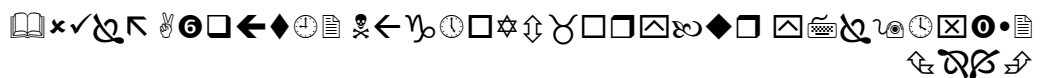
BAB II

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. Definisi Nikah

Dalam tatanan bahasa pergaulan sehari-hari kita mengenal dua istilah yaitu perkawinan dan istilah pernikahan. Kata perkawinan berasal dari kata “Kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.²⁹ Sedangkan Pernikahan berasal dari kata “Nikah” yang menurut bahasa berarti mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan dalam arti bersetubuh.³⁰ Kata nikah sendiri sering di dipergunakan untuk arti persetubuhan (*Coitus*) dan juga untuk arti akad nikah.³¹

Ada dua kata yang sering digunakan dalam akad perkawinan yaitu kata *az Zawaj* (زواج) dan an Nikah (النكاح). Kata *Zaujun* berasal dari kata *zawwaja* dengan tasdid *waw* diartikan pasangan atau jodoh.³² Sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah.⁵⁴ demikianlah. dan Kami berikan kepada mereka bidadari.



Artinya: Demikianlah. dan Kami berikan kepada mereka bidadari.

Maksudnya adalah Kami pasangkan mereka dengan bidadari.

²⁹Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet.ke.3 h.456

³⁰Muhammad bin Ismail al Kahlani, *Subulus al Salam*, (Bandung: Dahlan, tt.), Jilid III h.109

³¹Wahbah al Zuhaili, *al Fiqih Islam wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al Fikr, 1989), cet.III h.29

³²Ibnu Manzhur, *Lisan al `Arab*, Juz 3, (Kairo, Dar al Ma`rifah, t.th) h.1886

Lafal *az Zawaj* terdapat juga dalam surat at Takwir ayat 7.

وَمِنْ أَشْرَارٍ إِذَا دُفِنُوا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبَدَّلْ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَتَوَسَّىٰ أَرْضُ لَكُمْ وَكَانَ الظُّلُمُوتُ

Artinya: dan apabila ruh-ruh dipertemukan (dengan tubuh)

Maksudnya setiap bangsa berpasangan dengan orang yang dicintainya atau berpasangan dengan amal perbuatannya (QS.at Tkwir: 7)

Sebagaimana kata *zawaj* diucapkan pada akad, menurut fuqaha kata *nikah* juga banyak digunakan dalam akad. Kata *nikah* berasal dari kata *نكح* yang menurut bahasa berarti *ad Dhamm* (الضم) artinya bergabung atau berkumpul, hubungan kelamin (الوطء) dan juga berarti akad (عقد).³³ Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata *nikah* yang terdapat dalam al Qur'an mengandung dua makna tersebut. Kata *nikah* yang terdapat dalam surat al Baqarah ayat 230 :

وَمِنْ أَشْرَارٍ إِذَا دُفِنُوا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبَدَّلْ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَتَوَسَّىٰ أَرْضُ لَكُمْ وَكَانَ الظُّلُمُوتُ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

³³Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Khusaini, *Kifayatul Akhyar* Juz.II,(Semarang: Thoha Putra,tt.) h.36

Kata nikah pada kalimat diatas mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena pada petunjuk dari hadits nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami keduanya telah melakukan hubungan badan dengan perempuan tersebut.

Tetapi dalam al Qur`an juga terdapat ayat yang menerangkan kata nikah itu berarti akad yaitu surat Nisa ayat 22.



Artinya: Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).

Ayat tersebut diatas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram dinikahi dengan semata-mata ayah telah melangsungkan akad nikah dengan perempuan tersebut, meskipun diantara keduanya belum melakukan hubungan kelamin.

Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi diantaranya adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل المرأة بالرجل

Artinya: "Pernikahan menurut syara` yaitu aqad yang ditetapkan syara` untuk membolehkan seseorang bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang nya perempuan dengan laki-laki."³⁴

³⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) h.8

Secara istilah ulama berbeda-beda dalam memberikan definisi nikah. Perbedaan ini disebabkan dari berbedanya memaknai kata nikah tersebut: menurut golongan Syafi'iyah nikah adalah.

النكاح هو عقد يتضمن ملك وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما

Artinya: Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan watha` dengan lafadz nikah atau tazwij atau satu makna dengan keduannya. Menurut golongan ini nikah bisa berarti makna sebenarnya (hakiki) tetapi juga bisa bermakna majazi.³⁵

Selain definisi diatas juga ditemukan definisi yang lain yaitu;

عقد يتضمن إباحة الوطء بلفظ إنكاح أو التزويج

Artinya: Akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nikah atau zawaj.³⁶

Golongan ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu bermakna akad dalam arti yang sebenarnya (hakiki), namun juga dapat berarti hubungan kelamin namun dalam arti tidak sebenarnya (majazi). Penggunaan kata untuk bukan arti yang hakiki itu memerlukan penjelasan diluar dari kata itu sendiri.³⁷

Ulama Syafi'iyah ini memberikan definisi yang demikian melihat kepada hakekat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedangkan sebelum akad tersebut berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul.

Ulama hanafiah memberikan definisi

عقد وضع لتمليك المتعة بالانثى قصدا

³⁵ Jalal al Dien al Mahally, *Syarah minhaj al thalibin*, jilid III (Mesir: Dar alKutub al Kubro tt.) h.206.

³⁶ Ibid

³⁷ Al Mahally III .h.206

Artinya: Akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.”

Kata *تملك المتعة* sebagai frase pertama mengandung makna yang sama dengan kalimat; *إباحة الوطء* dalam definisi golongan madzah Syafi'iyah tersebut diatas. Karena sebelum dilaksanakan akad nikah seorang pria tidak dapat menikmati kesenangan dengan seorang wanita. Diakhir definisinya disebutkan kata *قصدا* sebagai pasal kedua dalam definisi yang secara bahasanya adalah secara sengaja mengandung makna menurut yang dituju atau yang disengaja oleh Allah. Karena menurut Islam perkawinan merukan kehendak Allah dan ssuai aturan Allah.

Menurut golongan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa nikah mengandung makna yang sebenarnya (hakiki) yakni hubungan kelamin. Jadi nikah adalah akad yang menfaidahkan memiliki, bersenang-senang dengan sengaja. Maksudnya adalah nikah itu mengnadung makna yang hakiki yaitu hubungan kelamin.³⁸

Menurut pendapat ulama Hanabilah berpendapat bahwa ;

عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع

*Artinya: Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafadz nikah atau tazwij guna untuk memperbolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.*³⁹

³⁸Ibnu al Humamam , *Syarah Fath al Qadir*, (Kairo;Mustafa al Babiy al halabi th.1970) h.185.

³⁹Jalaluddin, *al Mahalli Juz III* (Indonesia:Nur asia,tt) h. 2006

Menurut golongan Malikiyah Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semat-mata untuk memperbolehkan watha`, bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang dinikahinya.⁴⁰

Jika kita perhatikan definisi-definisi yang dikemukakan oleh para ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab Fiqih klasik tersebut diatas begitu sederhana hanya mengemukakan hakekat utama dari suatu perkawinan yaitu kebolehan untuk melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya akad .Padahal setiap perbuatan hukum itu memiliki tujuan dan akibat atau pengaruhnya. Hal inilah ini yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari seperti terjadinya perceraian, kurangnya tanggung jawab suami terhadap isterinya, sehingga memerlukan penegasan ulang makna atau arti sebuah pernikahan yang bukan hanya kebolehan melakukan hubungan seksual.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi nikah yang lebih luas yaitu:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونها ويحد ما لهما من حقوق وما عليه من واجبات

Artinya: Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hunungan keluarga (Suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”⁴¹

Ulama kontemporer memperluas jangkauan definisi yang lebih luas diantaranya adalah DR.Ahmad Ghandur dalam *bukunya al Syahksiyah fi alTasyri al Islami*”

⁴⁰Hariri Abdurrahman, *Fiqh `Ala Madzahib al `Arba`ah*,(Beirut Libanon; Ihya at Taurat al `Arabi 1969) h.4

⁴¹Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995) Jilid II, h.37

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الانساني مدي الحياة ويجعل لكل منهما حقوق قبل صحبه و واجبات عليه

*Artinya: Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban*⁴²

Disamping definisi diatas Undang-Undang No 1 tahun 1974 dalam pasal 1 merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴³

Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam rumusan tersebut diantaranya;⁴⁴

Pertama;digunakanya kata” seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu sekarang telah banyak dilegalkan di negara barat.

Kedua; digunakan kalimat sebagai suami isteri mengandung arti bahwa pernikahan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”

Ketiga; dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam peristiwa nikah mut`ah dan perkkawinan tahlil.

⁴² Abu Zahrah, *Ushul Fiqih* (Beirut: Dar al Fikri.tt) h.36

⁴³UU No.1 Tahun 19974 tentang Perkawinan. Pasal 1

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani;*Perkawinan dalam Hukum Islam dan UU*,(Bandung Pustaka Setia, 2008) 40

Keempat; disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan dalam rangka memenuhi perintah agama.

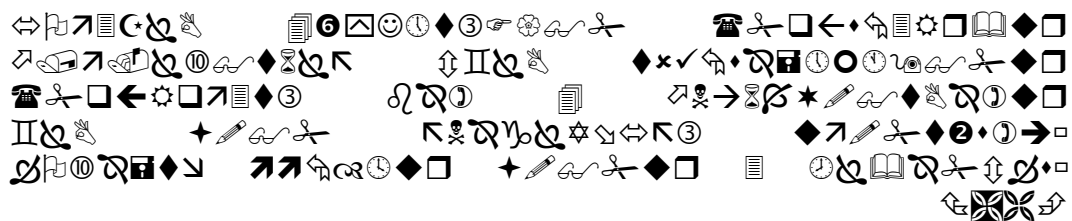
Selain dalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) , perkawinan menurut Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mistaqon ghalizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.⁴⁵

B.Dasar Hukum Pernikahan

Ciri utama sebuah rumah tangga yang selamat, bahagia, dan penuh rahmah adalah rumah tangga yang sesuai dengan petunjuk al Qur`an dan as Sunah Nabi SAW. Pernikahan memiliki peranan yang urgen bagi manusia dalam hidup dan perkembangannya. Untuk itu Allah melalui Nabinya memberikan suatu tuntunan mengenai pernikahan ini sebagai dasar atau pijakan hukum.

Adapun yang menjadi dasar hukum perkawinan adalah firman Allah dalam al Qur`an:

1. Surat An Nur ayat 32



Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukannya dengan karuniannya, dan Allah maha luas (Pemberiannya) lagi maha mengetahui”.

⁴⁵Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta: CV. Akademika Pressindo,1995) cet.ke 2 h.80

2. Surat an Nisa ayat 3



Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil ⁴⁶, Maka (kawinilah) seorang saja⁴⁷[266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

3. Surat ar Rum ayat 21



Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu kasih sayang .Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang berfikir.”

Selain ayat-ayat diatas juga disebutkan dalam beberapa hadits nabi yang menganjurkan untuk melakukan pernikahan. Adapun perintah tersebut disampaikan kepada para pemuda yang mampu dalam memberikan nafkah dan

⁴⁶ Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah

⁴⁷ Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

memiliki kesanggupan memelihara diri dari perbuatan-perbuatan tercela maka pernikahan baginya adalah sesuatu yang lebih baik baginya. diantara hadits-hadits tersebut adalah;

عن عبدالله بن مسعود رضى الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيم فإنه وجاء⁴⁸

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. Ia berkata Rasulullah SAW bersabda kepada kami "Wahai para pemuda, barang siapa diantara kamu sekalian ada yang mampu menikah, maka menikahlah. Maka sesungguhnya nikah itu lebih menjaga mata (menundukkan pandangan) dan memelihara kemaluan (farji). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka berpuasalah karena puasa itu adalah penawar (benteng)". (HR. Bukhari dan Muslim).

عن انس ابن مالك رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكنى انا اصلى وانا اصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس منى (متفق عليه)⁴⁹

Artinya: Dari Anas bin Malik ra., Bahwa Nabi SAW memuji Allah SWT dan menyanjung-Nya. Kemudian beliau bersabda "Akan tetapi Aku sholat, Aku tidur, Aku puasa, Aku Makan dan Aku mengawini perempuan. Maka barang siapa yang tidak suka akan sunnahku, maka ia bukan dari golongan ku.

Berdasarkan dalil-dalil yang menjadi dasar hukum di syari'atkannya pernikahan diatas, maka dapat dipahami bahwa hukum asal dari pernikahan adalah mubah. Oleh karena itu hukum nikah itu sesuai dengan illatnya, karenanya hukum nikah itu bisa berubah-ubah hukumnya bisa menjadi Sunnah, Wajib, Makruh dan Haram dan mubah.⁵⁰

Ibnu Rusyd menjelaskan tentang hukum nikah yaitu "Sebagian Fuqaha yakni jumhur ulama berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan

⁴⁸ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1992) h.429

⁴⁹ Ibid. h.110

⁵⁰ Abu Bakar muhammad Shata *Fanat Thalibin* (Beirut: Dar al Kutub, 1998) h.234

Zhahiriah berpendapat bahwa nikah itu hukumnya wajib. Ulama Malikiah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian orang dan mubah untuk yang lainnya.⁵¹

Al Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan pernikahan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima yaitu wajib, haram, sunnah, makruh dan adakalanya mubah.⁵² Demikian juga menurut ulama Syafi'iyah bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang empat yang lainnya mubah, wajib, haram dan makruh.⁵³

C.Syarat dan Rukun Nikah

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa setiap perbuatan bisa dianggap sah apabila sudah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam Islam suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan itu telah dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya sesuai dengan ketentuan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam. Syarat yang dimaksud dalam perkawinan adalah suatu hal yang pasti ada dalam perkawinan, akan tetapi tidak termasuk dalam hakekat dalam perkawinan.⁵⁴

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu pernikahan umpamanya rukun dan

⁵¹Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid wa Nihayah al Muqhashid*, (Beirut: Dar al Fikr, tt.) Jilid II h.2 Selanjutnya akan disebut *Bidayatuh al Mujtahid*

⁵²Abdurrahman al Jaziry, *Kitab Al Fiqh `Ala al Mazabi al Arba`ah*, (Mesir: Dar al Irsad.tt) Jilid 7 h.4

⁵³Abdur Rahman Ghazali. *Op.Cit.* h.18

⁵⁴ Muhammad Ibrahim al Bajjuri, *Hasyiyah al Bajuri* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1999),h. 25

syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada didalam hakekat dan merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya.⁵⁵

Syarat yaitu sesuatu yang harus di penuhi sebelum terjadinya perbuatan. sah atau tidaknya suatu pekerjaan sangat ditentukan terpenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Sehingga syarat perkawinan adalah sesuatu yang mesti ada atau memenuhi sebelum perkawinan itu dilaksanakan.

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansial. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan.

Ada sesuatu yang disepakati oleh para ulama dalam hal-hal yang harus ada dalam perkawinan diantaranya adalah akad perkawinan, laki-laki yang akan menikah, perempuan yang akan dinikahi, wali dari perempuan saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.

Ulama Hanafiah melihat pernikahan itu dari segi ikatan yang berlaku antara pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan itu. Oleh karena itu, yang menjadi rukun perkawinan menurut golongan ini adalah hanyalah akad nikah yang dilakukan oleh dua pihak yang melangsungkan perkawinan.

⁵⁵Amir Syarifuddin *Op.Cit.* h.56

Ulama Hanafiah membagi syarat perkawinan itu menjadi 5 macam yaitu⁵⁶ Syurut al in`qad yaitu syarat yang menentukan terlaksanannya suatu akad perkawinan.

1. *Syurut al Shihhah* yaitu syarat sesuatu yang keberadannya menentukan dalam perkawinan
2. *Syurut al Nufuz* yaitu syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan.
3. *Syurut al Luzum* yaitu syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan, seperti suami harus sekufu.

Akad nikah mempunyai beberapa rukun yang berdiri sendiri dan menyatu dengan substansinya. Akad nikah juga mempunyai beberapa syarat yang terbagi kepada beberapa syarat yaitu syarat jadi, syarat sah, syarat terlaksana dan syarat wajib.⁵⁷

Adapun rukun beserta syarat-syaratnya nikah menurut hukum Islam, berdasarkan jumhur ulama dijelaskan sebagai berikut:⁵⁸

1. Calon Suami dan Isteri

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak selai dari itu, seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan

⁵⁶Wahbah al Zuhaili jilid VII h.6533

⁵⁷Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayed Hawwas, *al Usroh wa ahkamimuha fii at Tasyri al Islam*, terj. Abdul Majid Khon. (Jakarta; Amzah 217) h.59

⁵⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011), 10.

karena hal ini yang disebutkan dalam al Qur`an Adapun syarat-syarat yang mesti dipenuhi bagi untuk laki-laki dan perempuan yang akan menikah adalah:

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya, baik menyangkut nama, jenis kelamin, keberadaan dan hal-hal lain yang berkenaan dengan dirinya. Adanya syariat peminangan yang terdapat dalam al Qur`an dan hadits nabi kiranya merupakan suatu syarat supaya keduanya telah sama-sama tahu mengenai pihak lainnya secara baik.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam .
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan
- d. Adanya persetujuan kedua belah pihak laki-laki dan perempuan
- e. Keduanya telah mencapai usia yang layak untuk melangsungkan pernikahan.

2. Wali nikah

Keberadaan seorang wali dalam akad nikah adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai salah satu rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri Wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

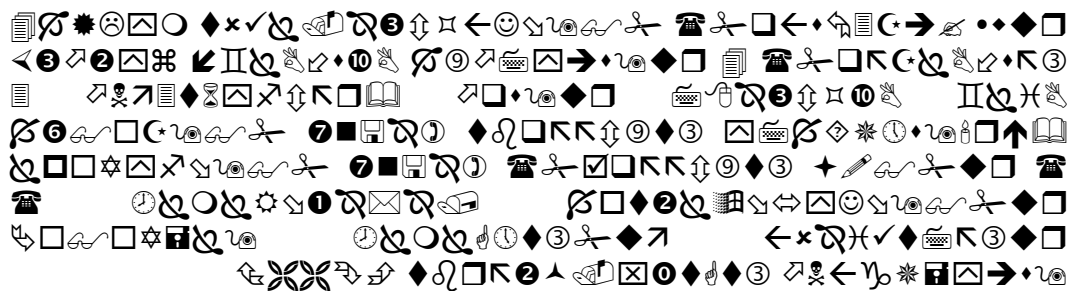
Dalam mendudukannya sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam melakukan akad terdapat beda pendapat dikalangan ulama. Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan ulama sepakat dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan. Alasannya adalah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat

dilakukan oleh walinya. Namun terhadap perempuan yang sudah dewasa baik ia sudah janda atau masih perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat ini disebabkan oleh karena tidak adanya dalil yang pasti yang dapat di jadikannya rujukan.

Memang tidak ditemukan satu ayat al Qur'an pun yang secara tegas dan jelas yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al Qur'an terdapat petunjuk nash yang ibarat-nya tidak menunjukkan keharusan adanya wali tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami menghendaki adanya wali. Disamping itu juga terdapat pula ayat-ayat al Qur'an yang dipahami perempuan dapat melaksanakan perkawinannya sendiri.⁵⁹

Diantara ayat-ayat al Qur'an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai berikut:

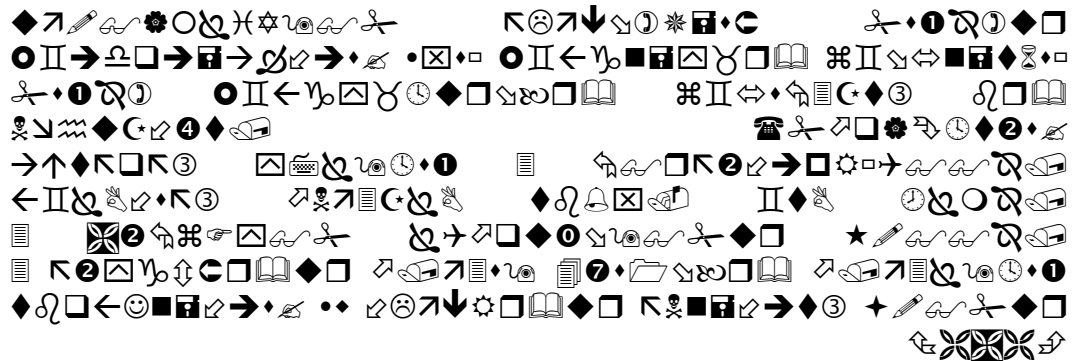
1. Surat al Baqarah ayat 221



Artinya: *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS.AL Baqarah 221)*

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan), Prenada Media Jakarta; 2007 hal. 70

2. Surat al Baqarah ayat 232



Artinya: *Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.*" (QS. Al-Baqarah :232)

3. Surat an Nur ayat 32



Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.* (QS. an Nur ayat.32)

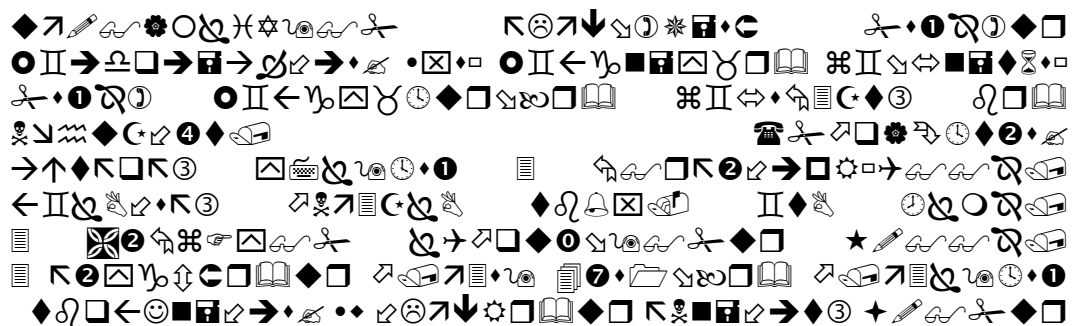
Ibarat nash ketiga ayat tersebut diatas tidak menunjukkan keharusan adanya wali; karena ayat yang pertama mengenai larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik, ayat kedua menerangkan tentang larangan menghalangi perempuan yang habis masa iddahnya untuk kawin,

sedang ayat yang ketiga perintah untuk mengawinkan orang-orang yang masih bujang. Namun dapat dipahami ketiga ayat tersebut berkenaan dengan perkawinan yang ditujukan kepada wali, maka dapat pula dipahami keharusan adanya wali dalam perkawinan. Dari ketiga pemahaman ayat tersebut maka jumhur ulama menetapkan adanya wali dalam perkawinan. Bahkan Imam Syafi'i menegaskan keberadaan wali merupakan syarat syahnya perkawinan sebagaimana keberadaan saksi. Nikah tidak sah tanpa wali laki-laki, mukallaf, merdeka, muslim, adil dan berakal sempurna.⁶⁰

Berbeda dengan jumhur, ulama Hanafiah dan Ulama Syi'ah imamiyah yang tidak mewajibkan adanya wali bagi perempuan dewasa dan sehat akalnya dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali mengadakannya. Dengan alasan orang yang akalnya sehat dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.

Adapun dalil yang digunakan oleh kelompok ini adalah:

1. Surat al Baqarah 232



⁶⁰ Wahab Zuhaili, *al Fiqih al Syafi'i al Muyasar* terjemah. Fiqih Imam Syafi'i, Jakarta: Almahira 2010 jilid 2 hal.459

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari akhir. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.” (QS. Al-Baqarah :232)

2. Surat al Baqarah 230

Artinya; Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkanNya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (al-Baqarah: 230).

3. Surat Al Baqarah ayat 234

Artinya; Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.” (QS.al Baqarah; 234)

Ayat pertama diatas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Ayat kedua juga menyatakan perempuan itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan ayat ketiga perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya kawin). Dalam ketiga ayat tersebut fa'il atau pelaku perkawinan itu adalah perempuan itu sendiri tanpa disebutkan wali.

Gambaran di atas adalah tentang perbedaan pandang mengenai kedudukan wali dalam suatu perkawinan pada situasi dan kondisi yang normal. maksudnya anak yang akan kawin adalah anak yang sah dari perkawinan yang sah. Bagi yang meyakini wali adalah bagian dari rukun pernikahan maka akan dicari dan ditentukan dahulu siapa yang akan bertindak sebagai wali. Akan tetapi bagi yang memandang bahwa wali bukan suatu rukun hanya sebagai penyempurna maka dia tidak bersusah payah untuk mencari walinya.

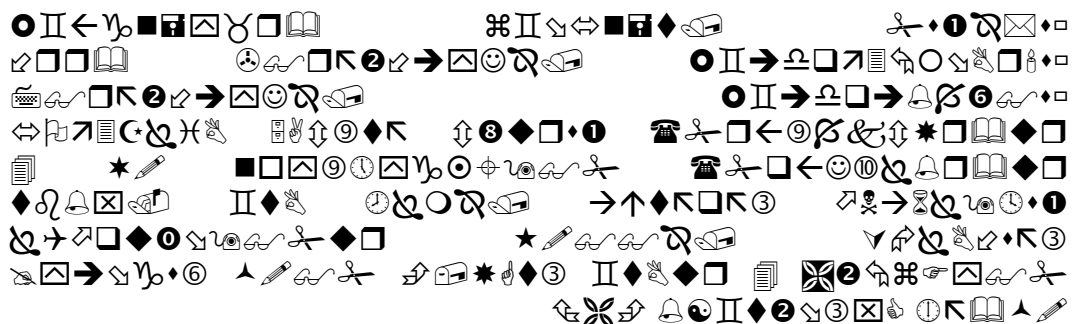
3. Saksi

Akad suatu pernikahan harus di saksikan oleh dua saksi supaya ada kepastian hokum dan untuk menghindari timbulnya sanggahan dari pihak-pihak yang berakad dibelakang hari. Dalam menempatkan kedudukan saksi dalam perkawinan ulama jumhur yang terdiri dari ulama syafi'iah, Hanabilah menempatkannya sebagai rukun dalam perkawinan, sedangkan menurut ulama Hanfiah dan Zhahiriah menempatkan sebagai syarat. (ibnu al Humam 250 dan ibnu Hazm:465) Demikian pula ulama Malikiah menyebutkan bahwa tidak ada

keharusan untuk menghadirkan saksi dalam waktu akad nikah, yang diperlukan adalah mengumumkannya namun disyaratkan adanya kesaksian melalui pengumuman itu sebelum bergaunya.

Berbeda dengan pendapat jumhur ulama di atas, menurut ulama Syi'ah imamiyah, bagi mereka tidak ada keharusan adanya saksi waktu berlangsungnya akad perkawinan bahkan akad dapat berlangsung tanpa adanya saksi. Keberadaan saksi bagi mereka adalah sunnah (al Thusi).

Dasar hukum keharusan adanya saksi dalam akad nikah terdapat dalam bentuk ayat al Qur'an dan beberapa hadits nabi. Adapun ayat yang dijadikan dasar adanya saksi surat at Thalaq ayat 2.



Artinya: Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

Adapun hadits nabi yang dijadikan dasar adanya saksi dalam nikah

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل

Artinya : “Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi”. (HR. Ibnu Hibban dalam kitab shahihnya. Ibnu Hibban berkata bahwasanya tidak shahih penyebutan dua orang saksi kecuali dalam hadits ini) (Lihat Tuhfatul Labiib, 2: 747).

Saksi dalam pernikahan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Saksi itu harus berjumlah sedikitnya dua orang. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Bagi ulama Hanfiah saksi itu boleh terdiri dari satu laki-laki dan dua perempuan (ibnu al Humam ;250)
- b. Kedua saksi beragama Islam
- c. Kedua saksi harus orang merdeka
- d. Kedua saksi harus laki-laki
- e. Kedua saksi harus bersifat adil
- f. Kedua saksi harus dapat mendengar atau melihat

4. Ijab Qobul

Syaratnya adalah adanya pernyataan mengawinkan dari wali, adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria, memakai kata-kata nikah, tazwij atau sejenisnya atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij, antar ijab qobul bersambungan, antar ijab dan qobul jelas maksudnya, orang yang berkaitan dengan ijab dan qobul tidak dalam keadaan ihram haji/umrah, majelis ijab qobul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya dan dua orang saksi.

D. Hak dan Kewajiban Suami dan Isteri

Setiap aqad yang dilaksanakan secara sah dapat dipastikan ia memiliki beberapa pengaruh yang kuat. Termasuk didalamnya adalah aqad nikah yang disebutkan dengan istilah aqad yang agung dan penting memiliki dampak

yang besar bagi kehidupan suami dan isteri. Suami memiliki kewajiban yang harus ditunaikan kepada isterinya. Demikian juga isteri memiliki kewajiban yang harus di tunaikan untuk suaminya.

Adapun kewajiban seorang suami kepada isterinya yaitu :

1.Mahar

Salah satu syarat dalam perkawinan dalam Islam adalah suatu wajib memberi mahar, etika Islam telah mengariskan bahwa kewajiban memberi mahar bukanlah suatu kewajiban yang menyusahkan, karena prinsipnya mahar itu adalah yang mudah dan ringan.⁶¹ Pada masa sekarang didaerah-daerah tertentu dan sebagian di negara Timur Tengah para wanita dan wali meminta mahar yang cukup tinggi, akibatanya banyak anak-anak gadis melajang hingga sampai batas kewajaran untuk usia nikah. Dan hal ini juga sebagai salah satu pemicu munculnya nikah misyar.

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang sudah membudaya menjadi bahasa keseharian khususnya dalam urusan pernikahan. Mahar diartikan sebagai pemberian wajib dari mempelai laki-laki kepada perempuan berupa uang atau benda (Barang) pada saat setelah berlangsungnya akad pernikahan.⁶²

Istilah mahar dalam bahasa Arab disebut dengan istilah yang lain yaitu shadaq, nihlah, faridhah, hiba`, ujr, `uqar dan alaiq. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima. Para ulama fiqih dalam memberikan definisi mahar tidak berbeda dalam subtansi

⁶¹ Abdul Aziz bin Fathi as Sayyid Nada, *Mausu'ah al `Adab al Islamiyah al Muratabah `ala Huruf al Hijaiyyah (terjemahaman)*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006) h. 213

⁶² Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia) h.

walaupun berbeda dalam redaksi. Golongan Hanafiah memberikan definisi sebagai berikut:⁶³

هو المال يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع

Artinya: Harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang terimannya.

Mahar itu merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan yang pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan untuk kelangsungan hidup perkawinan itu. Dengan pemberian mahar itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi materiil berikutnya.

Syari'at Islam tidak mengikat jumlah mahar dengan batasan terendah dan tertinggi bahkan cenderung mengesampingkannya tetapi hanya menyebutkan simbolnya saja dan bukan harganya. Intinya mahar itu berupa sesuatu yang ada nilainya. Mahar ditentukan oleh kedua belah pihak atas dasar kesukarelaan dan kesepakatan kedua belah pihak.⁶⁴

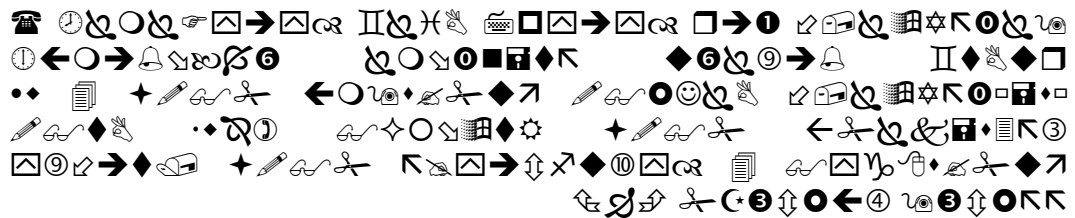
b. Nafkah

Nafkah wajib semata-mata karena adanya aqad yang sah, penyerahan diri isteri kepada suami, dan memungkinkannya bersenang-senang. Nafkah menjadi hak dari berbagai macam hak isteri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena, syari'at Islam menetapkan, baik isteri kaya atau fakir

⁶³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015) h.85

⁶⁴ Ali Yusuf as Subkhi, *Fiqih Keluarga pedoman keluarga dalam Islam*, (Jakarta: Amzah) h. 174

dari teks-teks al qur`an yang memberi kesaksian tentang hal itu. Allah menjelaskan dalam surat at Thalaq ayat 7.



Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Dari ayat diatas dapat di jelaskan bahwa menanggung keperluan kepada isteri merupakan ketetapan Allah SWT. bagi laki-laki, ini adalah bagian dari tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan hidup baik moril maupun materiil.

Pemberian nafkah ini tetap berjalan selama isterinya juga menjalankan kewajibannya dengan baik. Ia memenuhi batasan-batasan fitrahnya. Jika ia sombong dan menyalahi aturan, dan berpaling dari kewajibannya maka gugurlah kewajiban suami tersebut.⁶⁵

Istri berhak mendapatkan nafkah jika memiliki ketentuan-ketentuan sebagai berikut:⁶⁶

- a. Sah aqad nikahnya
- b. Penyerahan diri Isteri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang
- c. Selalu taat kepada suami

⁶⁵ Ibid. 186

⁶⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayye Hawwas, *Fiqh Munakahat*. Op. Cit. h.214

d. Adil

Seorang suami harus bisa berlaku adil dalam mu`amalah dan dalam mu`asyarah. Suami wajib menjaga dan memelihara isteri dari segala hal yang menghilangkan kehormatannya, atau merendahkan derajatnya, dan atau memalingkan pendengarannya karena dicela.

Cemburu adalah fitrah, oleh karena itu jika seorang suami cemburu terhadap isterinya dan merasa benci jika dilihat bersama orang lain yang bukan mahramnya adalah sesuatu yang wajar. Akan tetapi, sekarang dengan label kemajuan zaman dan peradaban, seorang suami mendahulukan isterinya atau saudaranya yang perempuan, atau ibunya untuk melayani tamu-tamu yang datang kerumahnya.

Selain berkewajiban memelihara isteri, suami juga wajib memberikan kepuasan dalam hubungan seksualnya. Ibnu Qudama berkata:” Berhubungan sek wajib bagi suami jika tidak ada uzur”⁶⁷ Hal yang demikian juga dikemukakan oleh imam Malik. Alasannya adalah nikah disyari`atkan untuk kemaslahatan suami dan isteri dan menolak segala bencana dari mereka. Ia melakukan hubungan untuk menolak gejala syahwat isteri, sebagaimana juga untuk menolak syahwat suami. Alasan tersebut menjadi suatu keharusan dan nikah inilah hak solusi mereka bersama.

Al Ghazali berpendapat bahwa sebaiknya suami mendatangi isterinya sekali dalam empat hari. Ini adalah ukuran yang sedang karena jumlah wanitanya ada empat dan boleh saja diakhirkan dari batas waktu tersebut. Akan tetapi boleh

⁶⁷Lihat *Al Mughni* jilid 7 h. 304

juga ditambah atau dikurang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan mereka suami isteri.⁶⁸

Sungguh indah dan sempurna ajaran Islam yang mengatur urusan keluarga hingga sampai pada hubungan lebih khusus, yakni hubungan seksual. Disini suami wajib menjaga isterinya dan memerintahkan selalu taat beribadah dan mampu dalam melaksanakan kewajibannya. Lebih daripada itu, Islam memberi motifasi bagi yang melaksanakan hak tersebut sebagaimana disampaikan oleh rasulullah SAW. diberi pahala olehnya karena perbuatan tersebut.⁶⁹

e. Mut`ah

Kata *mut`ah* dengan *dhammah mim* (mut`ah), atau *kasrah (mit`a)* akar kata dari *al Mata`* yaitu sesuatu yang disenangi. Maksudnya, materi yang diserahkan suami kepada isteri yang dipisahkan dari kehidupannya sebabkan karena talak atau yang semakna dengannya dengan beberapa sarat.⁷⁰

Mut`ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang telah diceraikan oleh suaminya sebelum bercampur dan sebelum kepastian mahar. Demikian pendapat Imam Abu Hanifah. Sebagian ulama berpendapat bahwa *mut`ah* dalam kondisi tertentu tidak wajib ia hanya sunnah. Demikian pendapat Imam Malik, Al lais Ibnu Layla dan pendapat Imam Syafi`i dalam qaul qadimnya.⁷¹

Fuqaha berbeda pendapat mengenai kadar atau ukurab besar kecilnya *mut`ah*. Sebagaimana mereka juga berbeda pendapat mengenai kondisi yang

⁶⁸Lihat *Fiqih Sunnah*, h.123

⁶⁹Lihat *Fikih munakahat* .karya Abdul ziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas h. 221

⁷⁰ Abdul ziz Muhammad Azam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas , *Fikih Sunnah* .Op.Cit h. 207

Mut`ah wajib diberikan kepada setiap wanita yang telah diceraikan oleh suaminya

⁷¹Ibid

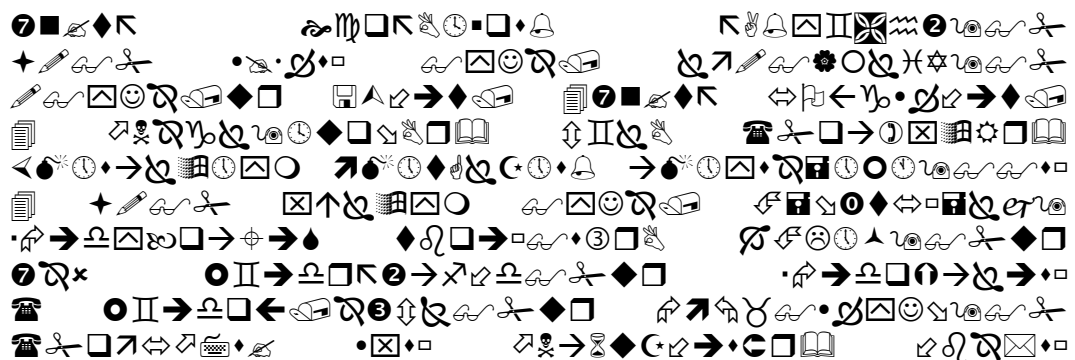
dijadikan pertimbangan mut`ah. Apakah berdasarkan pertimbangan suami saja? Ataukah Isteri saja? Atau pertimbagn keduanya.

Ulama Hanfiah dan Zhahiriah berpendapat bahwa mut`ah mempunyai ukuran yang ditentukan yaitu tiga helai pakaian, baju kurung, kerudung dan rangkapan. Sedangkan Ulama Syafi`iyah berpendapat bahwa mut`ah tidak memiliki ukuran tertentu, tetapi disunnahkan tidak kurang dari 30 dirham, atau sehargaitu. Kewajibannya tidak melebihi dari mahar mitsil dan tidak melebihi dari separug mahar mitsil.⁷²

Adapun kewajiban seorang isteri kepada suaminya adalah:

a. Taat kepada Perintahnya

Dalam hal ketaataan kepada suami dapat dibagi menjadi dua yaitu taat apa yang diperintahnya dan taat apa yang dilarangnya. Kewajiban isteri taat kepada suaminya merupakan hal mutlak yang harus dikerjakan atau jalankan selama perintah suami tersebut bukan perintah kemaksiatan tetapi perintah untuk ketaatan kepada Allah SWT.⁷³ Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari isyarat yang di sebutkan dalam al Qur`an surat an Nisa` ayat 34:



⁷²

⁷³Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al `Usrah al Muslimah terj. Fiqih keluarga*, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2011) h.206



Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri⁷⁴ ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)⁷⁵ wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya⁷⁶, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Didalam hadits juga dijelaskan:

لو كنت أمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها⁷⁷

Artinya: Seandainya aku menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya.

b. Menjaga diri (kehormatan) dan harta suami

Ketika suami tidak berada dirumah, ada beberapa kewajiban yang harus dijaga dan dipenuhi isteri yaitu menjaga kehormatannya dan menjaga harta suami. Diantara hak suami atas isteri adalah tidak boleh memasukkan seseorang kedalam rumahnya melainkan atas izin. Demikian juga jika suaminya membenci seseorang karena perintah syara`, maka juga harus taat.⁷⁸

⁷⁴ Maksudnya: tidak Berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

⁷⁵ Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik

⁷⁶ Nusyuz: Yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

⁷⁷ Hadist hasan Shaih, diriwayatkan oleh at Tirmidzi no. 1159, al Baihaki Juz VII/291

⁷⁸ Amir Syarifuddiin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008) h.

Selain menjaga diri atau kehormatannya dirumah, seorang isteri berkewajiban memelihara dan menjaga harta suaminya. Ia tidak menggunakan harta suaminya kecuali atas izin dari suaminya walau dalam hal kebaikan.

3. Berhias untuk suami

Diantara hak suami atas isteri adalah berhias atau berdandan dengan menggunakan baju dan perhiasan yang menarik. Setiap perhiasan yang dipakai akan semakin kelihatan keindahan bagi dirinya dan semakin menarik untuk suaminya. Seorang isteri harus selalu ceria, lemah lembut dan tersenyum agar suami semakin tertarik olehnya.⁷⁹

Sesuatu yang tidak diragukan lagi bahwa kecantikan wajah, dan perhiasan serta akhlak seorang isteri baik akan semakin menambah kecintaan seorang suami kepada isteri. Hal yang demikian adalah sesuatu yang fitrah bagi setiap laki-laki. Demikian juga jika ia melihat sesuatu yang tampak tidak indah bahkan cenderung buruk, maka akan mempengaruhi sikap dan penilaiannya, dia bisa membencinya dan menghindarinya.

Nabi menjelaskan dalam haditsnya:

خير النساء من تسرك إذا أبصرت وتطيعك إذا أمرت وتحفظ غيبتك في نفسها ومالك⁸⁰

Artinya : Sebaik-baiknya isteri adalah yang menyenangkan jika engkau melihatnya, taat jika engkau perintahnya, serta menjaga diri dan hartamu saat engkau pergi.

E. Tujuan Nikah

⁷⁹Yazid bin Abdul Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2014) h. 209

⁸⁰ HR.At Thabrani dari Abdullah bin Salam kitab *Shahih Jami'* no. 3299

Islam sangat menganjurkan pernikahan, pasti ada tujuan yang jelas di dalam pernikahan yang dilakukan itu. Namun tujuan pernikahan pada umumnya tergantung pada pihak yang menjalani pernikahan tersebut, karena sebenarnya tujuannya nikah itu subjektif. *Al-Ghazali* membagi lima tujuan adanya pernikahan yaitu : mendapat keturunan, menyalurkan syahwat, menghibur diri, pengelolaan rumah tangga, dan berjuang melawan kecenderungan nafsu atas masalah dalam keluarga.⁸¹

Dalam pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbutan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut Qudrat dan Iradat Allah dalam penciptaan aalam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umat.⁸²

Sifatnya sebagai sunnah Allah dapat dilihat dari rangkaian ayat-ayat ini; *Pertama:* Allah menciptakan makhluk ini dalam bentuk berpasang-pasangan. Surat adz Dzariat ayat 49



Artinya: Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? ⁸³sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendaki-Nya dan mereka tidak aniaya sedikitpun.

⁸¹ Al-Ghazali, *Adab al-Nikah*, (Bandung : Kharisma, 1997), 24.

⁸²Yazid bin Abdul Qadir Jawaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i 2011) h.15

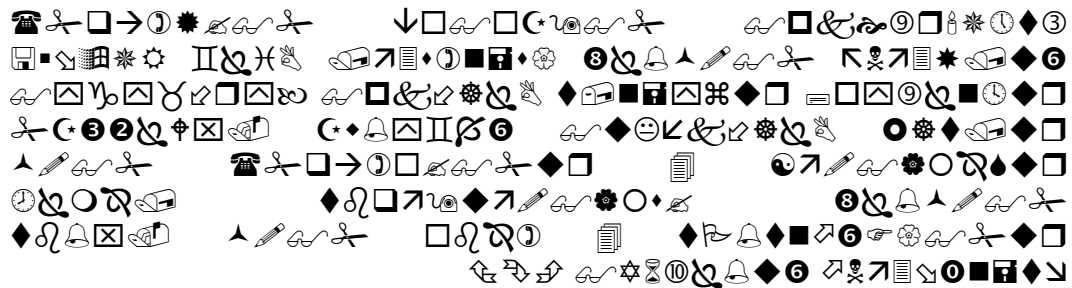
⁸³Yang dimaksud di sini ialah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menganggap diri mereka bersih. Lihat surat Al Baqarah ayat 80 dan ayat 111 dan surat Al Maidah ayat 18.

Kedua; Secara khusus pasangan ini disebut laki-laki dan perempuan. Surat an Najam ayat 45.



Artinya: Dan bahwasanya Dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita.

Ketiga; Laki-laki dan perempuan itu dijadikan berhubungan dan saling melengkapi dalam rangka menghasilkan keturunan yang banyak. Sebagaimana disebutkan dalam Surat an Nisa` ayat 1.



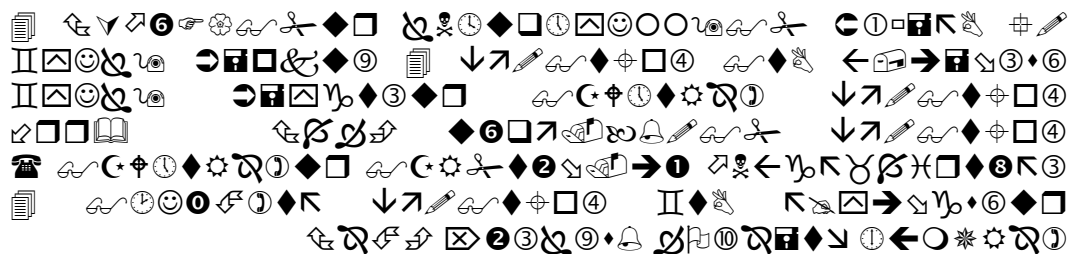
Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya⁸⁴ Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain⁸⁵ , dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

1. Mendapat Keturunan

⁸⁴ Maksud dari padanya menurut jumhur mufassirin ialah dari bagian tubuh (tulang rusuk) Adam a.s. berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. di samping itu ada pula yang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam a.s. diciptakan.

⁸⁵ Menurut kebiasaan orang Arab, apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti :As aluka billah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

Hal ini merupakan tujuan utama disyariatkan perkawinan agar dunia tidak menjadi kosong dari jenis manusia. Harapan untuk mendapatkan keturunan juga dimiliki oleh pria maupun wanita. Akan tetapi perlu diketahui bahwa mempunyai anak bukanlah suatu kewajiban melainkan amanat dari Allah SWT. Walaupun dalam kenyataannya ada seorang yang ditakdirkan untuk tidak mempunyai anak.⁸⁶ Allah berfirman dalam QS. As-Syura: 49-50;



Atinya: Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki. Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia dan memberikan anak-anak laki-laki yang Dia kehendaki.(49) Atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa) yang kehendaki-Nya, dan dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa. (QS.as Syura 49-50)

Dalam hal ini menurut al-Ghazali upaya ingin memperoleh keturunan adalah salah satu mencari keridhaan Rasulullah yakni dengan memperbanyak keturunan yang dengannya dapat membanggakan umatnya diantara umat-umat lain. Seperti yang pernah dinyatakan oleh beliau sendiri. Hal ini seperti yang dirawikan Umar r.a : aku sering menikah semata-mata karena ingin mempunyai banyak anak. Juga adanya beberapa riwayat yang menyatakan bahwa kemandulan

⁸⁶ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia, 1999), 13

adalah hal yang tidak disukai pada wanita.⁸⁷ Yang sebenarnya hal tersebut juga tidak disukai oleh kaum wanita itu sendiri.

2. Menyalurkan Syahwat

Syahwat seksual diciptakan untuk manusia pada hakikatnya adalah sebagai motivasi dalam mencapai tujuan perkawinan, dari pihak laki-laki itu diberi tugas untuk menyiapkan benih dan dari pihak wanita bertugas untuk menyediakan lahan untuk siap ditanami. Syahwat pada diri mereka itu sebagai pemicu yang secara halus dan santun untuk menghasilkan anak dari hubungan suami istri (Jima“).

Dalam al-Qur“an Allah mengisyaratkan hal tersebut melalui firman Allah SWT yaitu:



Artinya: Istri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu.”(QS.al Baqarah ayat.223)

3. Pengelolaan Dalam Keluarga

Keluarga atau rumah tangga adalah sebuah lembaga yang pada mulanya dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman ,

⁸⁷Al-Ghazali, *Adab al-Nikah*, 31.

damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang diantara mereka didalamnya. Sepasang suami istri seharusnya dapat menemukan ketenangan jiwa, kepuasan batin, dan gairah cinta didalam rumahnya.⁸⁸ Keluarga yang memiliki menejemen pengelolaan yang baik pasti akan mendapatkan manfaat-manfaat tersebut.

Menurut al-Ghazali seorang istri yang solihah adalah yang pandai mengatur rumah tangga guna memenuhi kewajiban agama. Sedangkan terbengkalainya urusan rumah tangga pasti membuat risau hati. Menurut abu sulaiman al-Darani berkata : seorang istri solihah tidak termasuk kemewahan dunia justru dialah yang mampu memusatkan perhatianmu untuk kehidupan akhiratmu dengan adanya istri yang pandai mengatur rumah tangga dan saluran aktifitas seksual halal.⁸⁹

Sesuai dengan pendapat Abu Sulaiman di atas, jelas bahwa wanita yang sholiah itu tidak hanya sebagai perhiasan terbaik dunia saja akan tetapi lebih dari itu, wanita sholihah itu ialah yang bisa memotivasi kita untuk selalu intens dalam menjalin hubungan dan bercengkrama dengan Allah SWT guna mencapai akhirat yang mulia disisi-Nya. Itulah yang makna yang haqiqi mengenai wanita sholihah sebagai sebaik-baiknya perhiasan dunia. Menurut Hammudah abd allat`i mengatakan bahwa antara laki-laki dan wanita sama derajatnya dalam pernikahan amat dianjurkan jika secara relatif ekonomi keduanya menjamin kehidupan mereka. Bagi wanita faktor ekonomi tidak dimasalahkan, tapi bukan berarti lalu perkawinan menurut Islam itu bisa digambarkan sebagai transaksi ekonomi. Menjadi tugas lelakilah untuk menjamin keamanan ekonomi keluarga ia harus

⁸⁸ Husein Muhammad, *Fikih perempuan*, (Lkis : Yogyakarta, 2007) h.150.

⁸⁹ Al-Ghazali, *adab al-nikah*,h. 44.

membantu istri dengan berbagai kebaikan, sedang tugas istri adalah mengerjakan tugas-tugas rutin rumah tangga yang diperlukan keluarga.⁹⁰

F. Prinsip-prinsip Dalam Pernikahan

Melaksanakan perintah Allah dan merupakan sunnah Nabi. Ini berarti bahwa melaksanakan pernikahan itu pada hekekatnya merupakan ajaran dari agama, oleh karena itu terdapat batasan-batasan yang termuat dalam syarat-syarat dan rukun-rukun yang harus dipenuhi. Oleh karena itu apabila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahannya dianggap batil atau rusak. Dengan demikian terdapat syarat-syarat lain selain dari rukun diantaranya harus memberi mahar dan adanya syarat memiliki kemampuan.⁹¹

Ada beberapa prinsip perkawinan menurut agama Islam yang perlu diperhatikan agar perkawinan itu benar-benar berarti dalam hidup manusia melaksanakan tugasnya mengabdikan pada Tuhan.

Adapun prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam itu ialah

1. Nikah adalah menjalankan Perintah Allah .

Sebagaimana di muka telah diterangkan bahwa pernikahan adalah sunnah Nabi, itu berarti bahwa melaksanakan perkawinan itu pada hakekatnya merupakan pelaksanaan dari ajaran agama. Agama mengatur perkawinan itu, memberi batasan rukun dan syarat-syarat yang perlu dipenuhi. Apabila rukun dan syarat-syarat tidak dipenuhi, batal atau fasidlah perkawinan itu. Demikian

⁹⁰ Hammuda „abd all`ati, *the family structure in Islam*, (Surabaya : PT Bina Ilmu) h. 75.

⁹¹ Nasiri, *Praktek Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Qardhawi Tinjauan terhadap fatwa nikah Misyar*(Surabaya: Khalista) h.21

pula agama memberi ketentuan lain di samping rukun dan syarat, seperti harus adanya mahar dalam perkawinan, dan juga harus adanya kemampuan nikah. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Ayyub Radhiyallahu anhu, ia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْحَيَاءُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالسَّيَّوَالُكُ، وَالنِّكَاحُ.

*Artinya: Ada empat perkara yang termasuk Sunnah para Rasul: rasa-malu, memakai wewangian, bersiwak, dan menikah.*⁹²

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan kita demikian, sebagaimana diriwayatkan oleh al-Bukhari dari ‘Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu anhu. Ia menuturkan: “Kami bersama Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam sebagai pemuda yang tidak mempunyai sesuatu, lalu beliau bersabda kepada kami:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁹³.

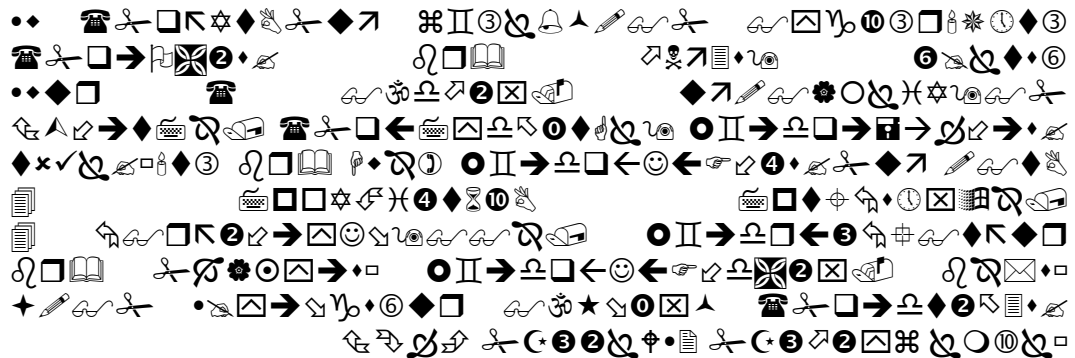
Artinya: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).’

2. Mitsaqan Ghalizhan (Ikatan yang Suci)

⁹²HR. At-Tirmidzi (no. 1086) kitab an-Nikaah, dan ia mengatakan: “Hadits hasan shahih.”

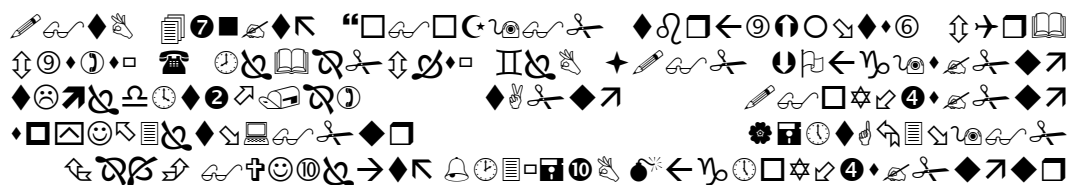
⁹³Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.

Sebuah pernikahan di bangun dalam sebuah ikatan yang suci. Ia tidak hanya sekedar menyatukan dua insan yang berbeda, tapi juga menyatukan dua keluarga besar yang berbeda kultur dan budaya. Bahkan Allah menyebut pernikahan dengan Mitsaqan Gholidzo (Perjanjian yang kuat)



Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa:21)

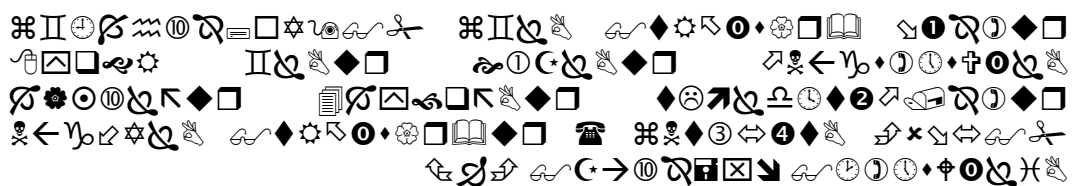
Bahkan di dalam Al-Quran hanya 3 kali Allah menyebutkan Mitsaqan Gholidzo (Perjanjian yang kuat). Yang pertama yang tersebut diatas, QS An-Nisa: 21 yang menyebut pernikahan adalah sebuah perjanjian yang kuat/teguh/kokoh. Yang kedua terdapat dalam QS An-Nisa: 154, Ini adalah perjanjian Allah dengan orang-orang Yahudi.



Artinya: Dan telah Kami angkat ke atas (kepala) mereka bukit Thursina untuk (menerima) Perjanjian (yang telah Kami ambil dari) mereka. dan Kami perintahkan kepada mereka: “Masuklah pintu gerbang itu sambil bersujud”, dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka:

“Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabtu”, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang kokoh. (QS An-Nisa: 154)

Yang ketiga terdapat dalam QS. Al-Ahzab:7, ini adalah perjanjian Allah dengan para Nabi.



Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil Perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka Perjanjian yang teguh. (QS Al-Ahzab:7)

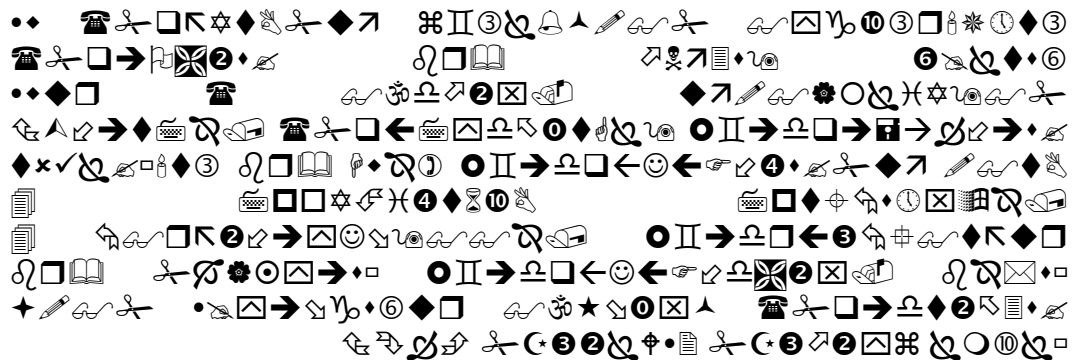
Begitu sakralnya sebuah pernikahan hingga Allahpun menyamakan perjanjian tersebut dengan perjanjian-Nya dengan para Nabi. Dengan mitsaqon gholidzo (Perjanjian yang kokoh) ini, seorang laki-laki dan seorang wanita menjadi sepasang suami istri setelah sebelumnya mereka hidup terpisah sebagai seorang individu. Memang dalam hitungan mereka itu berbilang, namun pada hakikatnya mereka itu satu. Al Qur'an pun telah menggambarkan kuatnya ikatan antara sepasang insan ini. Ayat yang mulia di atas merupakan ungkapan kedekatan antara keduanya. Masing-masing saling merasakan ketenangan dan saling menutupi dari apa yang tidak halal.⁹⁴

3. Mu`asyarah Bil Ma`aruf

⁹⁴ Al Jami' li Ahkamil Qur'an, 1/211-212, Tafsir Ibnu Katsir, 1/226.

Allah Swt memberikan hak-hak tertentu kepada pasangan suami dan istri. Keduanya diwajibkan untuk menjaga hubungan suami istri dengan baik sehingga jika keduanya memiliki hubungan yang harmonis maka akan tercipta kehidupah keluarga yang sehat dan harmonis. Bagaimana Islam menjaga dan mengatur hubungan antara suami istri?

Allah Swt berfirman:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. an Nisa` : 19)

Allamah Thabaththabai menjelaskan bahwa makna ma'ruf dengan menyandarkan pada firman Allah yang lain yaitu yang ada dalam surah al-Baqarah ayat 228, adalah semua amalan yang dikenal oleh masyarakat umun, yang lazim dilakukan oleh semua golongan manysarakat. Bergaul dengan patut adalah hak paling penting yang harus ditunaikan oleh suami istri. Beliau menambahkan bahwa ma'ruf yang mereka lakukan harus sesuai dengan urf masyarakat kebanyakan di daerah dan tempat serta waktu seseorang. Cara

berkomunikasi antara suami dan istri harus berdasarkan kebiasaan masyarakat yang bisa diterima antara kaum muslimin.

Perempuan adalah amanah Allah yang ada di rumah seorang suaminya, suami harus memenuhi segala kebutuhan istrinya. Dan sebaik-baik seorang mukmin adalah sebagaimana yang dijelaskan pada sabda nabi: “Seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada istrinya.”

Menurut pandangan al-Quran ma’ruf mengandung hal-hal yang harus dijalankan dan mengandung larangan-larangan yang harus ditinggalkan dan juga mengandung hukum-hukum fikih.

Karena itu, dibutuhkan sikap toleransi dan lapang dada untuk mempermudah peran masing-masing suami dan istri dalam rumah tangga dalam membentuk keluarga yang mulia. Yang dimaksud dengan menggauli dengan baik adalah: akhlak yang baik, lembut, bicara pelan dan tidak kasar, mengakui kesalahan dan kekhilafan yang semua orang pasti pernah melakukannya.

Nabi Muhammad Saw bersabda, “Yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan aku orang yang paling baik kepada keluargaku” juga “Dan para istri mempunyai hak yang seimbang dengan kewajiban mereka menurut cara yang ma’ruf.”

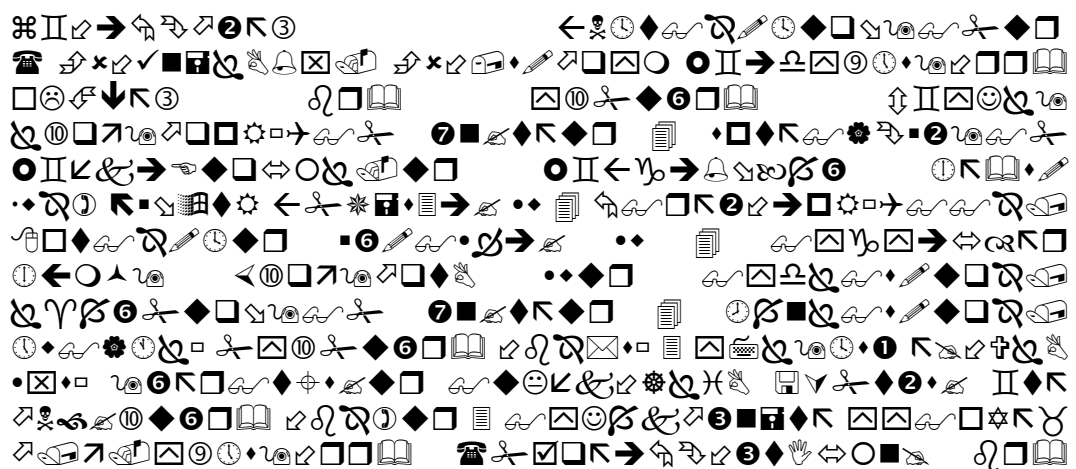
Adh-Dhahhak ketika menafsirkan ayat di atas, “Apabila para istri menaati Allah Swt dan menaati suami-suami mereka, maka wajib bagi suami untuk membaguskan pergaulannya dengan istrinya, menahan dari memberikan

gangguan/menyakiti istrinya, dan memberikan nafkah sesuai dengan kelapangannya.”⁹⁵

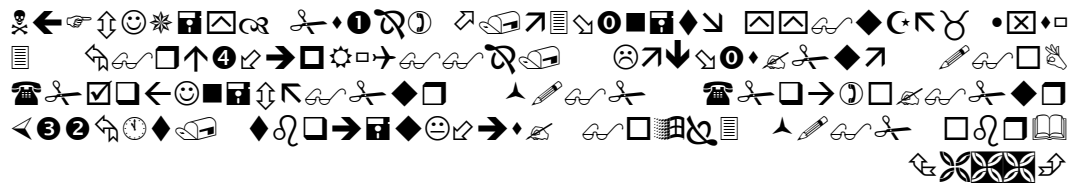
4. Musyawarah dalam keluarga.

Perbedaan pendapat atau sudut pandang dalam melihat suatu persoalan kerap kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Bahkan, Tak jarang kita jumpai perbedaan pendapat tersebut yang berujung dengan permusuhan. Padahal, semua itu bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan, yakni dengan musyawarah. Musyawarah adalah cara yang sangat mulia dalam menyikapi suatu persoalan. Karena dengan cara bermusyawarah ini, selisih paham dan pendapat dapat diselesaikan dengan hasil keputusan yang baik serta tidak merugikan pihak manapun. Bermusyawarah bisa dilakukan di mana saja, mulai dari lingkup kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan sosial bermasyarakat, hingga di tempat kerja.

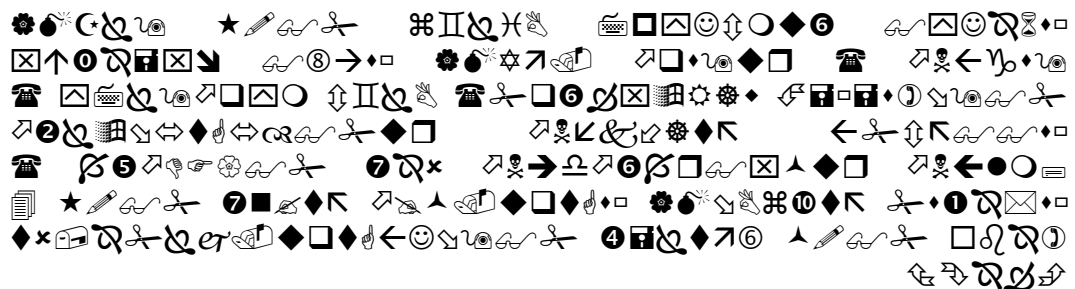
Dalam al Qur`an Allah sebutkan tentang perlunya musyawarah.



⁹⁵Tafsir Ath-Thabari, jil. 2, hal. 466



Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS.Al Baqarah :233)



Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.

e.1. Bentuk pernikahan yang dilarang

a. Nikah Shigar

a.1. Definisi nikah Shighar

Syighar (شغار) secara bahasa dimaknai dengan *ar raf'u* (الرفع) atau mengangkat. Digambarkan oleh Ashma'iy bahwa perilaku *syighar* sama seperti orang-orang yang saling mengangkat kaki secara berhadapan sebagai bentuk peremehan atas tawar menawar yang mereka lakukan. Imam Nawawi menggambarkan makna *syighar* dengan perbuatan anjing yang mengangkat kakinya ketika kencing. Bila dihungkan dengan kata nikah maka menjadi nikah *shighar* yang mengandung arti yang tidak baik, sebagaimana tidak baiknya pandangan terhadap anjing yang mengangkat kakinya waktu kencing.⁹⁶

Secara definitif nikah *shighar* ditemukan dalam hadits Nabi.

نهى رسول الله صلى عليه وسلم الشغار. الشغار أن يتزوج الرجل ابنته على أن يتزوجه الآخر ابنته وليس بينهم صداق

*Artinya: Rasulullah melarang perkawinan shighar. Shighar itu adalah seorang laki-laki mengawinkan anaknya dengan catatan laki-laki lain mengawinkan anaknya pula kepadanya dan tidak ada diantara keduanya mahar.*⁹⁷

Diriwayat Nabi dalam sabdanya:

والشغار ان يقول الرجل للرجل : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي او زوجني اختك وأزوجك أختي

*Artinya: Nikah syighar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, aku dengan saudara perempuanmu, maka akan akau nikahkan saudara Nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu. Nikahkanlah perempuanku dengan dirimu.*⁹⁸

Dalam hadits yang lain disebutkan

لا شغار في الإسلام

⁹⁶ Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam tentang perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993) h.67

⁹⁷ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz III, h.163

⁹⁸ *Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim no.1416 dari sahabat Abu Hurairah radhiyaaallahu anhu.*

Artinya: *Tidak ada nikah syighar dalam Islam*⁹⁹

Hadits-hadits diatas dijadikan dasar yang kuat atas keharaman atau tidak sahnya nikah shighar. Nabi tidak membedakan, apakah nikah tersebut disebutkan mas kawin.¹⁰⁰

Imam Syafi'i seperti yang dikutip oleh imam al San'ani dalam kitab *Subulus Salam* mengatakan "Tidak mengetahui secara jelas apakah definisi nikah misyar sebagaimana terdapat pada baris kedua hadits yang disebutkan diatas langsung dari Nabi, atau dirumuskan Nafi' atau dari Ibnu Umar sebagai salah satu sanad, namun definisi nikah shighar tersebut begitu populer dalam kitab fiqih.¹⁰¹

b. Hukum Nikah Shighar

Bahwa para ulama telah sepakat tentang keharaman nikah shighar ini. Hal ini telah tegas ada larangan dari Nabi, nabipun dengan jelas menjelaskan illat hukumnya yaitu tidak terdapat mahar dalam perkawinan tersebut, sedangkan mahar itu merupakan salah satu syarat dalam pernikahan.

Tentang sahnya perkawinan yang dilakukan dalam bentuk shigar ini terdapat perbedaan ulama. Perbedaan pendapat tersebut didasarkan kepada dua pandangan. Pertama, tidak bolehnya pernikahan shighar itu disebabkan adanya larangan itu sendiri dari Nabi. Setiap larangan menyebabkan tidak sahnya perbuatan yang dilarang itu kalau dikerjakan. Berdasarkan pandangan ini maka nikah shighar itu tidak sah.¹⁰² Kedua, dilarangnya pernikahan shighar tersebut

⁹⁹Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim no.1415 dari Ibnu Umar ra. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad no.165 Jilid III, al Baihaki no.200 jilid VII, Ibnu Hibban no.4142 dari Anas bin Malik ra. Selengkapnya lihat *Shahihul Jaami'* no.7501

¹⁰⁰al Wajiz hal.296-297 dan *al Mausuuah Fiqhiyah al Muyassarah* h.53-54

¹⁰¹ Al San'ani, *Subulus Salam* (Surabaya: Al Ikhlas, 1995) h.261

¹⁰² Ibnu Qasim al 'Ibadi, *Hasshiyah al Sharwani* (Bairut: Dar al Fikr, 1996) h.109

karena alasan tidak ada maharnya. Berdasarkan pandangan ini maka yang tidak sah dalam perkawinan tersebut adalah maharnya, bukan perkawinannya sendiri, karena perkawinannya terpenuhi rukun pernikahan`

e.2. Nikah Tahlil

a. Definisi Nikah Tahlil

Yaitu suatu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang sudah ditalak tiga oleh suami sebelumnya, lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat di nikahi kembali oleh suami sbelumnya (yang telah mentalak tiga) setelah masa iddah wanita itu selesai.¹⁰³

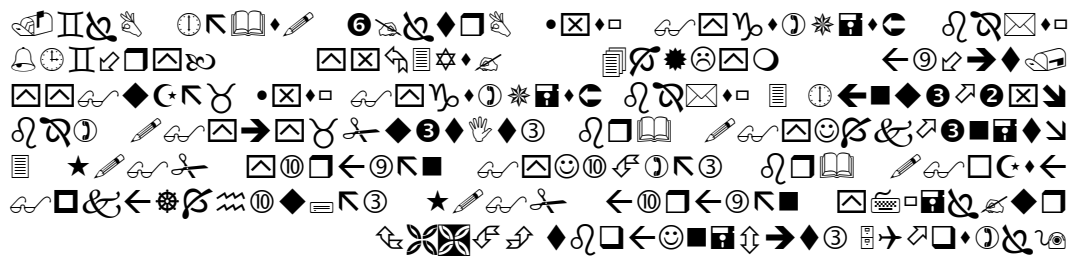
Kata *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya haram. Kalau dikaitkan kepada perkawinan akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan itu disebut muhallil, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebabkan oleh perkawinan *muhallil* dinamai *muhalllah*.¹⁰⁴

Bila seseorang telah menceraikan isterinya sampai tiga kali, baik dalam satu waktu atau tidak, sisuami tidak boleh rujuk lagi dengan bekas isterinya itu kecuali bila isterinya telah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis dalam masa iddahanya.¹⁰⁵ Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 230.

¹⁰³ Yazid bin Abdul Kadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i 2014) hal.41

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Almamah'arif, 1994), Cet Ke 9, Jilid VI, h.64

¹⁰⁵ Imam Qulyubi, *al Muhalla* (Beirut: Dar al Kutub, t.t) h. 267



Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.

Yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain dalam ayat diatas tersebut bukan hanya sekedar melakukan akad kawin saja, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri pada umumnya.

Dalam pernikahan tahlil biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebut dalam ucapan akad , seperti” Saya nikahkan engkau kepadanya sampai batas waktu mengaulinya” atau “Saya nikahkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak segera engkau menceraikannya.”Dalam bentuk ini perkawinan tahlil adalah perkawinan dengan syarat.¹⁰⁶

Perkawinan tahlil ini pada dasarnya tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan, namun karena ada niat orang yang menikahi iu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud yang sebenarnya, maka pernikahan ini dilarang oleh Nabi dan

¹⁰⁶ Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al Kutub, 1999) h. 98

pelakunya baik laki-laki yang menyuruhnya nikah atau laki-laki sebagai penghalalnya dilaknat oleh Nabi. sebagaimana disebutkan dalam hadits

لعن الله المحلل والمحلل له

*Rasulullah SAW melaknat muhallil dan muhallalah.*¹⁰⁷

b. Hukum Nikah Tahlil

Muhallil adalah sebutan bagi laki-laki yang menikahi wanita atas suruhan suami sebelumnya yang telah mentalaknya tiga kali. Hal ini bertujuan agar mantan suami itu dapat menikahi wanita tersebut setelah masa iddah nya selesai. Sedangkan Muhallalah adalah sebutan bagi seorang suami yang telah mentalak tiga isterinya lantas menyuruh seorang laki-laki untuk menikahi mantan isterinya lalu mentalaknya agar dapat kembali menikahi mantan isterinya itu setelah masa iddah nya selesai.

Ulama sepakat menyatakan bahwa pernikahan tahlil itu hukumnya haram, karena sesuatu yang dilaknat pelakunya adalah sesuatu yang diharamkan. Pernikahan tahlil adalah fasid baik ditinjau dari segi adanya larangan dan laknat pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat.¹⁰⁸

Apabila persyaratan itu dilakukan sebelum akad perkawinan tetapi tidak disebutkan dalam rumusan akad, kecuali hanya diniaatkan saja, kebanyakan ulama berpendapat bahwa yang demikian termasuk nikah tahlil dengan arti pernikahannya tidak sah. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat

¹⁰⁷ *Hadits shahih. Ibnu Abu Daud* no.2076, at Tirmizi no.1119 selengkapnya lihat Shahih al Jami'i shagir no.5101.

¹⁰⁸ Wahbah al Zuhayli, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu* .h.98

bahwa perkawinan dalam bentuk itu adalah sah karena akad perkawinan tidak terdapat adanya persyaratan. Akad pernikahan hanya batal dengan apa yang di syaratkan dan tidak dengan apa yang di niatkan.¹⁰⁹

Golongan Hanbila berpendapat pernikahan tersebut tidak sah meskipun dalam akad tidak disebutkan syarat, sama keadaanya dengan akad menggunakan syarat. Alasan yang digunakan dalam pernikahan tahlil sebagaimana disebutkan diatas.¹¹⁰

e.3. Nikah Mut`ah

a. Definisi Nikah Mut`ah

Nikah mu`at dalam hukum Islam biasa disebutkan dengan istilah “Pernikahan untuk masa tertentu”. Dalam arti pada waktu akad dinyatakan berlaku ikatan perkawinan terputus dengan sendirinya tanpa perceraian.¹¹¹ Pernikahan ini masih dijalankan dan dipraktekkan oleh orang-orang bermazhab Syi`ah Imamiyah yang tersebar di Iran dan Irak. Nikah mut`ah disebut juga dengan istilah nikah munqati` atau muaqqat sedangkan pernikahan biasa disebut nikah daaim.

Bentuk hakiki dari nikah mut`ah sebagaimana yang tertera dalam literatur fiqih shi`ah Imamiyah adalah sebagai berikut:¹¹²

¹⁰⁹ Ibid.106

¹¹⁰ Ibid.109

¹¹¹ Abd.Rahman al Jaziri, *al Fiqih `Ala Mazhabib al arba`ah* (Beirut:Dar al Fikr, tt) h.100

¹¹² Muhammad Baharun, *Epistimologi Antagonisme Shiah*, (Malang:Pustaka Bayan, 2004)

1. Ada akad nikah dalam bentuk Ijab dan Qabul antara pihak yang berakad, baik dengan menggunakan lafad *nakaha* atau *zawaja* yang keduanya digunakan untuk akad biasa atau juga yang menggunakan mata`a.
2. Ada wali bagi perempuan yang belum dewasa, sedangkan yang sudah dewasa tidak butuh wali, dan wali itu diutamakan laki-laki sebagaimana berlaku pada nikah daaim.
3. Ada saksi sebanyak dua orang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam syarat perkawinan daaim.

Nikah *mut`ah* adalah Pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita dalam batas waktu tertentu, dengan sesuatu pemberian kepadanya, berupa harta, makanan, pakaian atau yang lainnya. Jika masanya telah selesai, maka dengan sendirinya mereka berpisah tanpa kata *thalak* dan tanpa warisan. Bentuk pernikahan ini, seseorang datang kepada seorang wanita tanpa harus ada wali atau saksi. Kemudian mereka membuat kesepakatan mahar (*upah*) dan batas waktu tertentu; tiga hari atau lebih, atau kurang. Biasanya tidak lebih dari empat puluh lima hari; dengan ketentuan tidak ada mahar kecuali yang telah disepakati, tidak ada nafkah, tidak saling mewariskan dan tidak ada *iddah* kecuali *istibra`* (yaitu satu kali haidh bagi wanita monopause, dua kali haidh bagi wanita biasa, dan empat bulan sepuluh hari bagi yang suaminya meninggal), dan tidak ada nasab kecuali jika disyaratkan.¹¹³

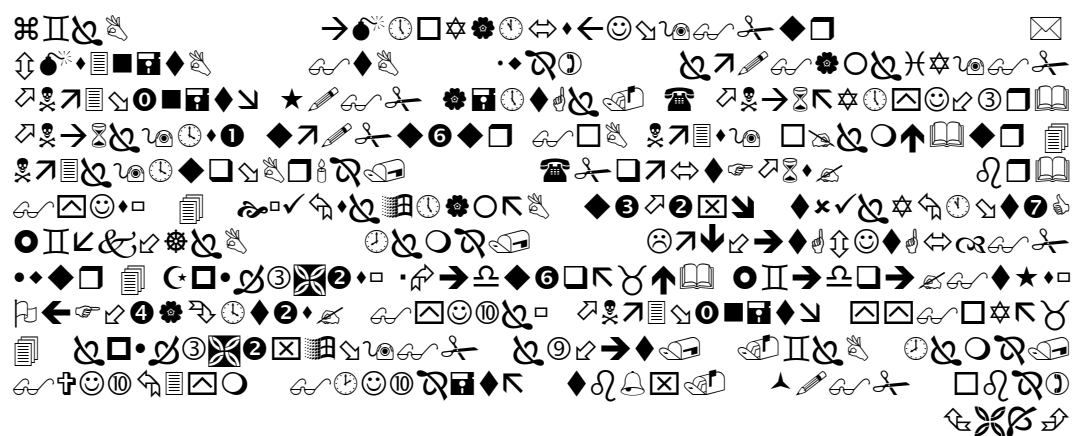
Pengertian nikah *mut`ah* yang sama juga dikemukakan oleh ulama mazhab Syafi`i dan Maliki menyebutkan adanya batasan waktu tertentu

¹¹³ Musthafa al-Adawi, *op. cit.*, Juz III, hlm. 169-170. Lihat al-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Beirut: Darul Kutub Ilmiah, tt), Juz III, hlm. 243. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut : Dar Alam Kutub, tt Juz X) h. 46

tertentu.¹¹⁴ Menurut ulama madzhab Syafi'i, mazhab Hanbali, dan Mazhab Maliki, nikah mut'ah disebut juga dengan nikah muaqqat (nikah yang dibatasi waktunya). Akan tetapi, ulama mazhab Hanafi ada perbedaan antara nikah mut'ah dan muaqqat, di mana akad dalam nikah mut'ah menggunakan kata-kata mut'ah seperti kalimat mata'tuka nafsi.¹¹⁵

b. Hukum Nikah Mut'ah

Pada masa awal Islam nikah mut'ah pernah dibolehkan, tetapi hal ini tidak berlangsung lama pernikahan ini hanya diperbolehkan pada saat perang tabuk. Kemudian setelah itu nikah mut'ah dilarang untuk selamanya oleh rasulullah. Larangan ini berdasarkan ayat al Qur'an dan Hadits. Surat an Nisa' ayat 24



Artinya: Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki¹¹⁶ (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain

¹¹⁴Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Umm*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz V, hlm. 52. IbnuAbi Zaid al-Qairawani, *Risalah Ibnu Zaid Ma'a Tsamriddani*, (Beirut: Dar al- Fiar, Juz II, tt) h.56.

¹¹⁵Dalam pandangan Hanafi, keharaman *mut'ah* telah menjadi *ijma'* sahabat. Hanafi jugamengemukakan beberapa penjabaran mengenai perbedaan hadis dan penafsiran sahabat tentang *ut'ah*. Lebih lengkap lihat al-Sarkhasy, *al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993) h. 155.

¹¹⁶ Maksudnya: budak-budak yang dimiliki yang suaminya tidak ikut tertawan bersama-samanya.

yang demikian¹¹⁷ (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu¹¹⁸. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Zhaihir ayat diatas menjelaskan mut`ah yang dilakukan dan imbalannya dalam bentuk mahar yang menjadi dasar adanya syari`at nikah mut`ah. Sebagian ulama yaitu ahli sunnah memahami kata istimta`um dengan arti perkawinan.¹¹⁹

Terdapat juga dalam shahih al Bukhari, khususnya pada bab pernikahan, ada ucapan Nabi yang ditujukan kepada para sahabatnya yang berbunyi.”

قد اذن لكم ان تستمتعوا فاستمتعوا ايما رجل وامرأة توافقا فعشره ما بينهما ثلاث ليا ل فمن احبه انيزيدادا

او يتركا

Artinya: Saya telah mengizinkan kepadamu untuk bermut`ah, maka lakukanlah mut`ah itu. Laki-laki dan perempuan yang sepakat, lakukanlah selama 3 hari, bila keduanya membolehkannya menambahkannya atau meninggalkannya.¹²⁰

Nikah mut`ah merupakan warisan dari tradisi masyarakat pra Islam yang dimaksudkan untuk melindungi wanita di lingkungan sukunya. Pada masa Islam, nikah seperti ini mengalami pasang surut. Pada masa Rasulullah SAW, nikah mut`ah mengalami beberapa kali perubahan hukum, dua kali dibolehkan dan duakali dilarang, dan akhirnya diharamkan untuk selamanya. Pada masa sahabat, larangan Rasulullah SAW pada dasarnya tetap menjadi pegangan jumbuh sahabat.

¹¹⁷ Ialah: selain dari macam-macam wanita yang tersebut dalam surat An Nisaa' ayat 23 dan 24

¹¹⁸ Ialah: menambah, mengurangi atau tidak membayar sama sekali maskawin yang telah ditetapkan.

¹¹⁹ Wahab al Zuhayli, *Tafsir al Munir* (Beirut: Dar al kutub, Juz II, 2000) h.234

¹²⁰ Imam Bukhari, *Shahih Bukhari juz I* h. 46

Akan tetapi, ada sebagian kecil di antara mereka yang masih membenarkan, bahkan melakukan praktek nikah *mut'ah*, seperti yang dilakukan oleh Jabir bin Abdullah. Pada masa kekhalifahannya, Umar bin al-Khattab (581-644) secara tegas melarang siapa saja yang melakukan nikah *mut'ah* dengan ancaman hukum rajam.¹²¹ Larangan Umar ini dapat menghentikan secara total praktek nikah *mut'ah*.¹²² Keadaan ini tetap terpelihara sampai generasi berikutnya.

Dalam konteks ini Tidak ada keraguan lagi, nikah *mut'ah* hanya diperbolehkan pada permulaan Islam. Sebagian ulama berpendapat, bahwa ia dihalalkan kemudian dimansuhkan (dihapus), lalu dihalalkan kemudian dimansuhkan. Sebagian yang lain berpendapat, bahwa penghalalan dan pengharaman berlaku terjadi beberapa kali.¹²³

Menurut ulama mazhab empat serta jumhur sahabat dan tabi'in, yang dirujuk oleh kaum *Sunni* nikah *mut'ah* untuk selanjutnya dilarang. Ada beberapa hal yang menjadi dasar larangan tersebut yaitu: Pertama, larangan Rasulullah SAW., dalam beberapa hadis. Menurut Ibnu Rusyd larangan tersebut diketahui secara mutawatir. Seluruh hadis yang memuat larangan ini menurut ahli hadis adalah shahih. Di antaranya adalah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW., bersabda, "Wahai sekalian manusia, aku telah membolehkan kalian melakukan nikah *mut'ah*. Ketahuilah! Sekarang Allah telah mengharamkannya

¹²¹Diriwayatkan dari Umar. Ra. Bahwa ia berkata : aku tidak akan mendatangi seseorang yang menikahi wanita sampai batas waktu tertentu kecuali aku akan merajamnya, apabila aku menemukannya telah meninggal, aku akan merajam kuburnya.

¹²²Pada masa pemerintahan al-Ma'mun (Khalifah ke-7 Abbasiyah, 813-833 M), nikah *mut'ah* secara formal dibolehkan kembali. Akan tetapi nikah *mut'ah* ini dilarang kembali oleh khalifah berikutnya, al-Mu'tashim (833-842 M).

¹²³Abu al-Fida' Ibnu Katsir, *Tafsir al Qur'an al-'Azhim*, (Kairo : Maktabah Ulum wal Hikam, Juz I, tt) h. 449

sampai hari kiamat nanti.”¹²⁴ *Kedua*, sebagian ulama berpendapat bahwa keharaman nikah *mut'ah* dalam Islam sudah merupakan hasil ijma'. *Ketiga*, dilihat dari tujuannya, nikah *mut'ah* hanya untuk memenuhi kebutuhan syahwat, bukan untuk menjaga kesejahteraan dan kelangsungan keturunan, sebagaimana diharapkan dari perkawinan.¹²⁵

Persoalan nikah *mut'ah* dan perbedaan pendapat ulama di kalangan Sunni dan Syi'ah tentang status hukumnya merupakan fenomena yang sangat menarik dan diperlukan suatu penyelidikan mendalam. Bahkan, masalah waktu dan sejarah pembolehan dan pelarangan *mut'ah* oleh Nabi saja, ulama masih berbeda pendapat sehingga sangat wajar bila kemudian terjadi perbedaan yang luar biasa panjang tentang nikah *mut'ah*, terutama bila dikaitkan dengan esensi dari pernikahan. Perbedaan ini semakin menjadi-jadi karena kasus *ikhtilaf* nikah *mut'ah* ini terjadi tidak dalam satu rumpun “aliran”, namun dalam dua blok yang dikenal telah bertikai sangat lama, yakni *Sunni* dan *Syi'ah*.

¹²⁴Hadis lain yang juga sering digunakan oleh empat madzhab adalah perkataan Ali yang disampaikan pada Ibnu Abbas tentang pengharaman nikah *mut'ah*. Lihat dalam Abu Laits al-Samarqandi, *al-Muhaddzab*, (Ttp :, Dar Ihya' at-Turats al-Araby, juz II, tt) h. 68

¹²⁵Lihat Tujuan Perkawinan dalam : Abu Abdillah al-Qurtubi, *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), Juz XIV, hlm. 16-17. Ali Ahmad al-Jurjani, *Hikmah al-Tasyre' waFalsafatuhu*, (Beirut : Dar al-Fikri, 1974), hlm. 102. Abbas al-Mahmud al-Aqqad, *al-Mar'ah fi al-Qur'an*, (Kairo : Nahdhah Misr, 2003) h. 101

BAB III

SADDU AZ DZARI`AH

A. Latar Belakang

Keberadaan manusia dalam tatanan masyarakat pasti memerlukan hukum, yang bertujuan untuk mengatur kenyamanan dalam bermuamalah. Islam adalah agama yang paripurna¹²⁶ sebagaimana diungkapkan Islam adalah muncul dari sebuah sistem yang sempurna dan bulat. Kesempurnaannya meliputi segala bidang meliputi *aqidah*,¹²⁷ *muamalah*,¹²⁸ *munakahat*¹²⁹, *jinayah*¹³⁰ dan hukum. Sumber hukum islam dapat dibagi menjadi dua yaitu sumber hukum Islam yang disepakati dan sumber hukum Islam yang tidak sepakati oleh para ulama.

Al Qur`an dan Sunnah merupakan sumber hukum dalam Islam yang telah disepakati oleh para ulama. Adapun sumber hukum Islam yang masih diperselisihkan diantaranya adalah *Ijma`*, *Qiyas*, *Qaulu Sahabi*, *Maslakhah Mursalah*, *Istikhsan*, *Istishab* dan *Saddu Dzari`ah*.

¹²⁶ Lihat makna Surat al Maidah ayat 3

¹²⁷ Menurut Abu Bakar Jabir al Jazairi, Aqidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum (aksioma) oleh manusia berdasarkan akal, wahyu dan fitrah. Kebenaran itu dipatrikan oleh manusia di dalam hati serta diyakini kesahihan dan keberadaannya secara pasti dan ditolak segala sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran itu.

¹²⁸ Muamalah adalah sebuah hubungan manusia dalam interaksi sosial sesuai syariat, karena manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup berdiri sendiri. Sedangkan dalam arti khusus muamalah adalah aturan dari Allah dengan manusia lain dalam hal mengembangkan harta benda.

¹²⁹ Berasal dari Nikah. Kata dasar dan pernikahan adalah nikah. Kata nikah memiliki persamaan dengan kata kawin. Menurut bahasa Indonesia, kata nikah berarti berkumpul atau bersatu. Dalam istilah syari`at, nikah itu berarti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan din antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama, demi terwujudnya keluarga (rumah tangga) bahagia, yang diridai oleh Allah SWT.

¹³⁰ Jinayat adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan ta'zir.

Dalam lintasan sejarah hukum Islam, para mujahid telah mengembangkan berbagai macam teori, metode atau cara dan prinsip hukum yang belum dirumuskan secara baik dalam al Qur`an dan Sunnah. Usaha para ulama tersebut tidak lepas perkembangan masyarakat yang semakin kompleks, dengan berbagai persoalan-persoalan yang baru bermunculan sedangkan persoalan tersebut belum terdapat dalam al Qur`an dan Sunnah.

Adapun salah satu cara yang dikembangkan oleh para ulama dalam menetapkan suatu yang baru yaitu dengan menggunakan metode “Saddu Dzari`ah”. Metode ini bertujuan untuk mencegah atau upaya preventif agar tidak terjadi hal-hal yang tidak baik atau dampak negatif ditengah masyarakat. Metode hukum ini merupakan kedinamisan hukum Islam yang mampu menjawab persoalan-persoalan baru yang muncul di masyarakat.

B. Definisi Saddu Dzari`ah

b.1. Secara Bahasa

Kalimat saddu dzari`ah terdiri dua kata yaitu kata al-Sadd (السد) kata al-dzariah (الذريعة) . Kata al-Sadd (السد) menunjukan kata benda yang tidak nyata (Abstrak) dari kata سدا - يسد - سد , yang berarti menutup sesuatu yang cela atau cacat (rusak) dan menimbum lobang.⁶ Sedangkan kata al-dzariah (الذريعة) merupakan bentuk isim mufrad yang bermakna jalan, atau wasilah (sarana),⁷ dan sebab terjadinya sesuatu. Adapun bentuk jama`nya adalah adz dzara`i (الذرايع), oleh karena itu kita menemukan dalam beberapa

⁶Muhammad bin Mukarram bin Manzbur al Afriqi al Mishri, *Lisan al `Arab juz 3*, (Beirut: Dar Shadir, tt) h.207

⁷ *Ibid* juz 8.h.93

kitab ushul fiqih *Tanqih al Fhusul fi Ulum al Ushul* karya dari al Qarafi, maka digunakan kata saddu dzara`i.

Dzari`ah adalah perkataan atau perbuatan yang menjadi media terwujudnya perkataan atau perbuatan lain. Para fuqaha membatasi perkataan dan perbuatan sebagai akibat dari media atau wasilah tersebut kepada perkataan atau perbuatan yang terlarang.⁸

Dalam kalimat lain di definisikan sebagai berikut:

السد بمعنى اغلاق الخلل وردم الثلم و بمعنى المنع⁹

“artinya menutup cela, dan menutup kerusakan, dan juga berarti mencegah atau melarang .” Pada mulanya kata adzariah dipergunakan untuk orang sebelum Islam (orang arab) yang sedang melaksanakan berburu binatang. Dimana dia pergi menggunakan unta, ketika sudah sampai ditempat perburuan maka unta tersebut di lepaskan sebagai alat untuk bisa mendekati binatang buruan tersebut, agar tidak kelihatan. Setelah dekat dengan hewan buruan maka dia akan melepaskan anak panahnya . Oleh karena itu menurut Ibn al `Arabi kata adzari`ah kemudian digunakan sebagai makna metafora terhadap segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada sesuatu yang lain.¹⁰

b.2.Secara Istilah

Prof.Dr.Alaidin dalam bukunya “Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih” memberikan definisi Saddu menutup, penghalang, hambatan, atau sumbatan sedangkan Dzari`ah berarti wasilah atau jalan kesuatu tujuan atau menghambat atau

⁸Mukhtar Yahya dan Ftachur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqih Islam*, (Bandung:PT.Al Ma`arif, 1986)h. 234

⁹Su`ud bin Mulluh Sulthan al `Anzi , *Saddu Dzara`i i`nda Imam Ibnu Qayyim al Jauziayah, wa atsaruhi fi Ikhtiyarathihi al Fiqiyyah*,(Omman,Urdun: Darul ilmu) h.64

¹⁰Ibn Manzhur, *Lisanul Arab. Loc.cit.*

menghalangi atau menyumbat semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat.

Menurut Abu Zahra sebagaimana juga dikemukakan oleh Narun Haroen yang memberikan definisi Dzari`ah sebagai wasilah atau sebagai jalan kepada sesuatu atau sesuatu yang membawa sesuatu yang dilarang dan mengandung kemudharatan. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah mengartikan sebagai perbuatan yang zahirnya boleh tetapi menjadi perantara kepada perbuatan yang diharamkan.¹¹

Al Qarawi mengatakan Saddu Dzari`ah adalah memotong jalan menuju kerusakan, sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meskipun suatu perbuatan itu terbebas dari unsur kerusakan, namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau wasilah terjadinya suatu kerusakan, maka kita harus mencegah perbuatan tersebut.¹²

الوصيلة التي يتوصل بها الى الشيء سواء كان حسيا أو معنويا¹³

Artinya: Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hiisi atau ma`nawi (Baik atau buruk).

Menurut AS Syatibi mengatakan bahwa Dzari`ah adalah

ان حقيقة قاعد الذريعة هي التوصل بما هو مصلحة الى مفسدة¹⁴

Artinya “Sesungguhnya hakekat dari qaidah Dzari`ah adalah ia yang menghubungkan sesuatu yang baik kepada yang buruk. Artinya adalah seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada hakekatnya diperbolehkan, karena mengandung suatu kemaslahatan (Kebaikan),

¹¹Ummu Isfaroh Tihanjanti, *Penerapan Saddu Dzari`ah terhadap penyakit Genetik Karier Resesif dalam perkawinan Inbreeding*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali jaga, 2004) h.27

¹²Al Qarafi, *Tanqih al Fushul fi `Ilm al Ushul*

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) Jilid 2 h.397

¹⁴Yusuf Abdurrahmann al Farat, *At Tabiqat al mu`asyirat li saddi dzari`at qahirah*, (Dar al Fikr al `arabi, 2003), h.11

tetapi tujuan yang akan dicapai atau diraih berakhir pada kerusakan (Mafsadat).

Al Qarawi mendefinisikan saddu dzari`ah dengan

الذريعة هي الوسيلة للشيء ومعنى ذلك حسم مادة وسائل الفساد دفعا لهكان الفعل السالم من المفسدة
وسيلة الى المفسدة من عم نذل كالفعت¹⁵

Artinya: *Dzari`ah bermakna perantara atau jalan kepada sesuatu perkara. Maknanya adalah Mencegah atau menahan jalan-jalan yang kelihatannya hukumnya mubah (boleh), namun bisa menjerumuskan pada perkara-perkara yang larang atau haram, dengan tujuan mengurangi sebab keharaman dan kemaksiatan dengan kata lain mencegah terjadinya perkara-perkara yang haram.*

Menurut Ibnu `Asyura memberikan definisi dengan istilah:

لقب سد الذرائع قد جعل لقب لخصوص سد ذرائع الفساد¹⁶

Artinya: *Dinamakan Sad Dzariah karena sudah lazim menjadi sebutan untuk mencegah hal-hal yang akan membuat kerusakan.*

B. Rukun Sadd Dzari`ah

Rukun Saddu Dzari`ah sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad

Hisyam al Burhani sebagai berikut:

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (Sebagai washilah, sarana, atau jan). Dalam hal ini di bagi dalam tiga kondisi:
 - a. Maksud dan tujuan perbuatan itu ialah perbuatan yang lain (قد يكون مقصدا لغيره) seperti bai`ul ajal

¹⁵Ja`far bin Abdurrahman Qasas, *Qaidatu saddu Dzara'i wa atsaruhi al Fiqiyah* . h.7

¹⁶ Ibrahim bin Mahna bin `Abdilah bin Mahanna, *Sad Dzara'i `Inda Syaikh Islam Ibnu Taimiyah*, (Riyad: Dar Fadilah, 2004) h.26

- b. Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah tertuju pada perbuatan itu sendiri (يكون مقصودا لذاته قد) seperti menghina orang lain dengan cera mencera atau mencacimakinya.
 - c. Perbuatan itu menjadi azaz menjadikannya sebagai perantara atau wasilah انه اساس الا ول الذي تكون عليها الذريعة انه seperti larangan menghentakkan kaki abgi seorang perempuan yang dikhawatirkan akan kelihatan perhiasan yang ada dikakinya.
2. Kuatnya tuduhan kepadanya (al ifdha). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan terlarang (al mutawasil ilaih) yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa dampak kepada kerusakan.
 3. Kepada perbuatan yang dilarang (al Mutawasil ilaih). Para ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai al mamnu (Perbuatan yang dilarang) , maka jika perbuatan tidak dilarang atau mubah, maka wasilah atau dzari`ah tersebut hukumnya tidak dilarang¹⁷.

A. Dasar Hukum Sadd Dzari`ah

Sebagai salah satu sumber hukum dalam Islam keberadaannya sangat di butuhkan jika melihat beberapa perkara yang muncul pada zaman sekarang ini, banyak peristiwa dan perkara baru yang meminta fatwa untuk ditetapkan hukumnya guna untuk ketentraman umat dalam beragama.

Sebagai mana Qiyas, Istikhsan dan Istiskhab jika dilihat dari pemakaiannya termasuk Sadd Dzari`ah adalah satu metode istimbat hukum

¹⁷Hifdhatul Munawaroh, *Sadd al Dzari`ah dan aplikasinya pada permasalahan fiqih kontemporer*(Jurnal Ijtihat vol.12 dikutip.1 juni 2019)h.67

(mengambil keputusan hukum) dalam Islam. Keberadaannya masih diperselisihkan oleh para ulama , karenanya para ulama menempatkannya sebagai dalil hukum yang masih diperselisihkan tau belum disepakati ulama.

Layaknya sebagai dalil hukum maka Sadd Dzari`ah juga memiliki dasar hukum yang kuat diantaranya adalah:

1. Al Qur`an

1.a. Surat al `An`am ayat 108.



Artinya: Dan janganlah kamu memaki sesembahan-sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampau batas tanpa pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Allah mereka kembali, lalu dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. (QS. Al `An`am: 108)

1.b. Surat An Nur ayat 31.



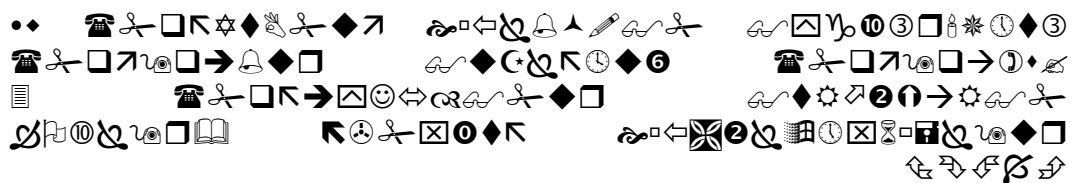
Artinya: Dan janganlah mereka memukulkan (Menghentakkan) kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan (Pakai).

Dari kedua ayat diatas telah memberikan gambaran kepada kita bahwa pertama; Bahwa mencaci maki tuhan atau sesembahan orang lain itu adalah Dzari`ah, yang akan menimbulkan tindakan balasan dari orang tersebut untuk mencaci maki Tuhan kita. Maka adanya larangan mencaci tuhan orang lain

merupakan tindakan pencegahan (Preventif). *Kedua* pada surat an Nur menjelaskan tentang wanita yang menghentak kakinya dimana di kakinya terdapat perhiasan yang dipakainya. Hal ini dilarang karena akibat perbuatannya tersebut bisa mendatangkan mafsadat atau kerusakan bagi wanita tersebut seperti perampasan atau penjambretan. Apalagi dilakukan dihadapan laki-laki yang bukan mahromnya.¹⁸

Dari kedua tamsil larangan diatas , dapat kita ketahui adanya perbuatan-perbuatan yang dilarang meskipun pada mulanya perbuatan itu dibenarkan atau di bolehkan dalam arti mubah. Maka ulama membuat kaidah bahwa jika perbuatan itu mengakibatkan kerusakan yang berat maka hukumnya jadi haram akan tetapi jika , akan tetapi jika hukumnya tidak terlalu kuat jatuh ke Makruh. Dalam hal ini para ulama mendasarkan pada dua sisi yaitu mendorong untuk berbuat dan yang kedua adalah sasaran atau tujuan yang akan dijadikan kesimpulan.¹⁹

Selain dua ayat diatas juga terdapat ayat lain yang bisa dijadikan sandaran hukum tentang Saddu Dzari`ah sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al Qurtubi²⁰ berdasarkan surat al Baqarah ayat 104.



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman , janganlah kamu katakan (Kepada Muhammad) “raa`ina” tetapi katakanlah “unzhurna” dan

¹⁸Wahbah Zuhaili, *al Wajiz Fi Ushul Fiqih*. loc.Cit hal. 109

¹⁹Hifdhotul Munawaroh, *Sadd Dzari`at dan Aplikasinya pada permasalahan Fiqih Kontemporer Jurnal Ijtihad* (Hifdhohzeyla@gmail.com) h.68

²⁰Muhammad bin Ahmad bin Bakr bin Farkh Al Qurtubi, *al Jami` li Ahkam al Qur`an*, Juz 2, (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah, 1998), h.56

dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapatkan azab yang sangat pedih(QS.al Baqarah;104)

Pada ayat diatas Allah melarang kaum mu`minin berkata kepada Rasulullah SAW raa`inan. Lantaran orang-orang Yahudi menjadikan kata-kata itu sebagai media untuk mengejek Rasulullah SAW, dengan mengartikan kata-kata itu seperti bahasa mereka. Mereka menggunakan kata raa`inan ²¹(راعنا) sebagai bentuk kalimat Isim fa`il dari masdar ru`anah yang berari bodoh .²²

1. Hadits

Selain ayat-ayat diatas ada juga sunnah atau hadits nabi yang bisa dijadikan sandaran atau dasar Saddu Dzari`ah diantaranya;

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه قال يسب الرجل ابا الرجل فيسب اياه ويسب امه

23

Artinya: Dari Abdullah bin Amr RA. Ia berkata.Rasulullah SAW bersabda, “termasuk diantara dosa besar seorang laki-laki melaknat kedua orang tuanya. Beliau kemudia bertanya. Maga caranya seseorang melaknat kedua orang tuanya? Beliau menjawab seorang laki-laki mencaci maki ayah orang lain, kemudia orang lain itu mencaci maki ayah dan ibu laki-laki tersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Imam as Syatibi bahwa hadits ini merupakan salah hadits yang dijadikan dasar hukum Saddu Dzari`ah. Hadits ini menurut beliau adanya dugaan (Zhann) bisa digunakan sebagai dasar untuk

²¹Arti kata Raa`ina ialah sudilah kiranya kamu memperhatikan kami. Kata-kata ini diucapkan oleh para sahabat dengan arti itu. Aakan tetapi orang-orang Yahudi menggunakan kata-kata itu, menurut arti bahasa mereka yaitu bodoh sekali kamu (Ru`anah) sebagai ejekan kepada Nabi.Itulah sebabnya Tuhan menyuruh mengganti kata-kata itu dengan “Unzhurna” yang bermakna “Sudilah kiranya kamu memperhatikan kami”

²²Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin Hasan bin Husain at Taimi ar Razi, *Mafatih al Ghaib* (tafsir ar Razi Juz 2 h.261 dalam kitab digital al maktabah asy syamilah versi.2.09

²³ Muhammad bin Ismail Abu Abdullah al Bukhari al Ja`fari, *al jami` as Shahih al Muhktasar*, (Beirut: Dar ibn Kasir, 1997) h.2228

penetapan hukum berdasarkan Dzari`ah.²⁴ Larangan Nabi untuk mendekati perkara yang subhat, dikhawatirkan terjerumus kedalam perkara yang dilarang.

2. Qaidah Fiqiyah

Selain dalam al Qur`an dan Hadits juga terdapat Qaidah fiqiyah yang dapat dijadikan sebagai sandaran hukum Sadd Dzari`ah sebagai salah satu metode istimbat hukum dalam Islam yaitu;

درء المفسد أولى من جلب مصالح²⁵

Artinya :*Menolak kerusakan (keburukan) itu lebih di dahulukan dari pada mendapatkan kebaikan (Maslakhah) .*

Selain itu juga terdapat kaidah lain yang juga bisa dijadikan dasar dalam saddu dzarariah yaitu”

إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام²⁶

Artinya: Apabila berkumpul antara yang halal dan yang haram , maka yang menang adalah yang haram.

Kedua kaidah diatas merupakan kaidah yang asasi yang bisa mencakup masalah-masalah turunannya, berbagai kaidah lain juga akan bersandar kepadanya. Oleh karena itu dapat kita tarik sebuah konklusi bahwa dalam saddu dzari`ah itu terdapat mafsadat atau kerusakan (keburukan) yang harus dihindari.`

3. Logika

²⁴As Syatibi, al Muwafaqat. *Op Cit.*h.132

²⁵Imam Tajjuddin Abdul Wahab bin `Aliyi Ibnu `Abdi al Kahfi Assubki, *Al Asybah wa an Nadzair*, (Beirut: Dar al Kitab al Ilmiyah, 1991) jilid I h.105

²⁶Abdurrahman bin Abi Bakar as Syuyuti, *Al Asybah wa an Nadzhir* (Islamic Book, 2010) h.68

Akal sehat kita akan mengatakan ketika seseorang membolehkan atau membenarkan suatu perkara, maka seyogyanya ia juga membolehkan segala sesuatu yang mengatarkan kebolehan untuk melakukan perkara tersebut. Demikian juga sebaliknya jika ia melarang atau menolak suatu perkara maka semestinya ia juga akan menolak atau melarang segala sesuatu yang mengantarkan kepada larangan tersebut.

Hal ini sebagaimana di ungkapkan oleh Ibnu Qaiyyim dalam kita A`lam al Muqin” disaat Allah melarang suatu perkara , maka Allah pun juga akan melarang perkara-perkara atau jalan-jalan yang mengantarkan kepada perkara tersebut. Hal ini ingin menegaskan adanya larangan dalam perkara tersebut. Namu jika sebaliknya Allah membolehkan atau membenarkan segala jalan atau perantara tersebut tentu hal ini bertentangan dengan pelarangan yang telah ditetapkan.²⁷

Untuk menetapkan suatu sarana atau wasilah itu bahwa sarana itu diharamkan untuk suatu tujuan perlu diperhatikan:²⁸

1. Tujuan, jika suatu maqasidnya dilarang, maka sarana atau jalannyapun juga dilarang dan jika maqasidnya wajib maka sarana atau jalannyapun juga diwajibkan.
2. Niat atau motif, jika motifnya atau niatnya untuk mengapai yang halal , maka sarana atau janlannyapun halal, jika niat yang di capai itu suatu yang haram sarananyapun juga jadi haram.

²⁷Muhammad bin Abi Bakar Ayyub Azhari Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al Jauzi, *Ilamu al Muqi`in*, (Beirut: Dar Al Kutub al `Ilmiyyah, 1998) h.496

²⁸Khoirul Abror, *Saddu Dzari`iah dan Signifikasinya dalam Hukum Islam*, dikutip dari <http://khoirulabrord.blogspot.com/2012/saddu-az-zariah-dan-Sig>, pada tanggal 22/09/2019.

Akibat suatu perkara atau perbuatan mukallaf. Jika menimbulkan kebaikan atau manfaat seperti yang dikehendaki oleh syariat agama, maka sarana atau wasilah hukumnya boleh untuk dikerjakan akan tetapi sebaliknya jika mengakibatkan kerusakan atau mafsadat walau tujuannya baik atau demi kebaikan maka hukumnya jadi juga tidak boleh.²⁹ Sebagai contoh adalah mengambil katup jantung orang yang telah meninggal dunia. Pada dasarnya mengambil katup jantung (membedah) mayat orang yang telah meninggal dunia dilarang. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Daud ra.” Membedah atau merusak tulang orang telah wafat, samadengan memecah atau membedah semasa dia masih hidup.” Namun jika tidak ada pilihan atau demi untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang membutuhkan maka hal ini dibolehkan dengan catatan mendapat wasiat dari yang bersangkutan atau mendapat izin dari ahli warisnya.³⁰

B. Macam-macam Saddu Dzari`ah

Saddu Dzariah dapat dibagi menjadi dua macam yaitu pertama Saddu Dzari`ah jika dilihat dari dampak aspek akibat yang akan terjadi dan *Saddu Dzariah* jika dilihat dari aspek kesepakatan para ulama terdahulu. Jika dilihat

²⁹Syamin Syukur, *Sumber Hukum Islam*, (Suarabaya: al Ikhlas, 1993) h.112

³⁰<http://halalguide.info/content/view/103/5/5> di kutip tanggal 28/11/2019

dari sisi dampak dari akibat yang terjadi, Ibnu Qaiyum membaginya dalam empat macam yaitu:³¹

Dengan memperhatikan sifat asal dari Dzari`ah dan efek perbuatan yang terjadi Ibnu Qayyim memerinci Dzari`ah menjadi 4 macam.³²

Pertama; Dzari`ah yang membawa kerusakan pasti. Misalnya perbuatan zina menjadi perantara adanya percampuran dan ketidakpastian status nasab seseorang, demikian juga khamar menyebabkan kehilangan akal. Perbuatan-perbuatan tersebut dilarang dengan hukum haram atau makruh menurut kadar kerusakan yang ditimbulkan.

Kedua Dzari`ah yang diperbolehkan menurut asalnya dan orang mukallaf yang melakukannya tidak ada niat selain menurut pengertian yang asli dan perbuatan tersebut dapat membawa kerusakan. Akan tetapi kemaslahatan yang terdapat di dalamnya lebih kuat daripada kerusakannya. Misalnya kebenaran kepada penguasa yang zalim atau memandang wanita yang dilamar. Dzari`ah semacam ini dihukumi mubah, atau sunnah atau wajib melihat kadar kemaslahatannya. Ia tidak termasuk dalam pembicaraan Saddu Dzariah. Hal ini disebabkan mafsadat yang ada padanya lemah (kecil). Sedangkan mafsadat yang lemah (marjuh) itu tidak dipertimbangkan di dalam syari`at. Oleh karena itu dalam masalah peradilan mengenai tindak pidana pembunuhan, perzinaan dan gangguan harta milik diperlukan persaksian, sekalipun kemungkinan ada

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 2001), h.403

³² Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Op.Cit.* h.350

kesaksian palsu atau salah, atau seseorang diperkenankan mengqashar sholat biar berpergiannya tidak mendapat kesukaran.³³

Ketiga; Dzaria`ah yang diperbolehkan menurut asalnya dan orang mukallaf yang melakukannya tidak ada niat selain menurut pengertiannya yang asli, akan tetapi dapat membawa kepada kerusakan yang lebih berat. Dengan kata lain akibat dari kerusakannya lebih berat dari kemaslahatannya. Seperti memaki-maki sesembahan orang musrik didepan umum, atau seorang isteri yang berdandan yang baru saja ditinggal mati oleh suaminya.

Jenis yang ketiga ini, menjadi tempat perselisihan diantara ulama dan fuqaha. Pada umumnya para ulama menganggap bahwa zari`ah yang demikian adanya hukumnya terlarang.

Menurut pendapat Ali Hasaballah bahwa Saddu Dzari`ah dalam jenis yang ketiga ini tidak lagi menjadi perselisihan diantara ulama kecuali mengenai perbedaan pandangan tentang manakah yang lebih kuat kemaslahatannya atau mudharatnya atau seimbang antara manfaat dan akibatnya.

Orang yang selalu memegang kaidah bahwa segala sesuatu pada dasarnya mubah, tidak melarang Dzari`ah bila sama kemungkinan keduanya. Dan orang yang berpendapat bahwa dalil-dalil larangan itu ditujukan kepada bagian-baian yang kadang-kadang membawa kemaslahatan dan kemafsadatan sama, maka ia melarangnya. Yang demikian ini merujuk kepada hadits Rasulullah SAW'

³³*Ibid*

دع ما يريبك الى ما لا يريبك

Artinya: Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan kamu menuju kepada sesuatu yang tidak meragukan kamu.

Dan adanya larang beliau untuk meninggalkan perkara yang syubhat.

من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه

Artinya: Barang siapa yang mengembala di sekitar tanah larang (raja), maka ia mendekatkan diri untuk jatuh kedalamnya.

Keempat: Dzari`ah yang menurut asalnya diperbolehkan, akan tetapi orang yang mengerjakannya bermaksud menggunakannya sebagai media kepada kemafsadatan. Sebagai contoh Menghibahkan sebagian harta miliknya kepada seseorang di akhir tahun zakat untuk menghindari kewajiban membayar zakat, lantaran hartanya sudah tidak lagi mencapai nisab yang ditentukan. Contoh lain nikah tahlil yaitu akad nikah yang lakukan oleh pihak ketiga terhadap janda yang di talak tiga, akan tetapi pernikahan itu tidak berlangsung lama dan kemudian dia menceraikannya lagi, dengan tujuan agar dapat dinikahi oleh suaminya yang pertama.³⁴

Sedangkan Saddu Dzariah jika dilihat dari aspek kesepakatan para mujtahid, sebagaimana yang dikemukakan oleh al Qarawi dan As Syatibi membagi Dzari`ah menjadi tiga bagian yaitu:

- a) Ada sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang walaupun bisa menjadi sarana atau timbulnya kerusakan atau perbuatan yang haram. Seperti Menanam anggur, yang kemungkinan bisa dijadikan minuman yang memabukkan atau khamar.

³⁴Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Op.Cit.* h.352

- b) Adanya sesuatu yang disepakati untuk dilarang. Seperti mencaci maki sesembahan agama orang lain. Karena di duga keras (Zhan) orang tersebut akan mencaci sesembahan agama Islam.
- c) Sesuatu perkara yang belum disepakati atau diperselisihkan antara boleh dikerjakan atau dilarang untuk dikerjakan. Seperti memandang wanita yang bisa menimbulkan perzinaan dan adanya perdagangan yang menggunakan berjangka yang dikhawatirkan dapat menimbulkan riba.³⁵

Wahbah Zuhaili memberikan pengertian yang berbeda antara dzari`ah dengan muqadimah, beliau membuat perumpamaan dzari`ah itu ibarat anak tangga yang menghubungkan keloteng sedangkan muqaddimah itu seperti pondasi yang menjadi dasar tegaknya suatu dinding atau bangunan.³⁶

C. Pendapat Ulama Tentang Saddu adz Zari`ah

Sebagai salah cabang ilmu Ushul Fiqih adalah salah satu ilmu alat untuk mengaji persolan-persoalan yang baru yang sudah ada dalam al Qur`an dan Hadits dan persoalan-persoalan yang berkembang di masyarakat, sementara dia memerlukan jawaban hukum yang cepat.³⁷

Saddu dzari`ah merupakan salah satu dari sumber-sumber hukum syari`at. Imam Malik paling banyak menggunakannya dasar ini didalam kitab fikihnya. Oleh karena itu pendukung beliau terus memperluas penggunaan dasar ini sampai orang-orang menganggap saddu dzari`ah itu hanya dikembangkan oleh ulama mazhab Maliki saja. Padahal kenyataanya tidaklah demikian. Sebab ulama-ulama

³⁵Lihat dalam kitab digital al Maktabah as Samilah , Al Qarawi, *Anwar al Buruq fi Anwa` al Furuq*, juz 6 h. 319

³⁶ Wahbah Az Zuhaili, *Ushul Fiqih al Islam*.Op.Cit h.875

³⁷Said Agil Husein Al Munawar, *Hukum Islam dan Plularitas Sosial* (Jakarta: Penamadani,2005),h. 26

selain ulama Malikiyah banyak juga yang menggunakan saddu dzai`ah sebagai sumber hukum.

Sebagai bukti yang menggunakan saddu dzari`ah bukan hanya ulama Malikiyah saja dapat kita ikuti pendapat Imam Qurafi sebagai berikut: Imam Malik bukanlah satu-satunya yang menggunakan saddu dzari`ah, bahkan seluruh ulama mempergunakannya. Dan bukan hanya khusus Ulama Malikiyah saja. Mereka tidak lain hanya memberi tambahan dan penghalusan saja. Sebab ada beberapa dzari`ah yang secara ijma` disepakati untuk dilarang seperti umat Islam dilarang mencaci maki orang tua orang lain atau menghina sesembahan agama lain. Selain itu, juga terdapat ijma yang menyepakati untuk dilarang misalnya menanam anggur. Menanam anggur sepakat tidak dilarang biarpun anggur itu kemungkinan akan disalah gunakan untuk membuat minuman yang memabukkan. Selain itu juga terdapat dzari`ah yang masih diperselisihkan oleh para ulama antara dibolehkan atau diharamkan jual beli dengan menangguhkan.³⁸

Dikalangan fuqaha terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan saddu dzari`ah sebagai sumber hukum dalam Islam. Ada yang menerima dan pula yang menolaknya. Dari perbedaan pendapat dikalangan fuqaha tersebut dapat di bagi dalam tiga kelompok yaitu kelompok yang menerima secara mutlak sebagai sumber hukum, kelompok yang menolak secara mutlak sebagai sumber hukum, dan kelompok yang menolak tetapi tidak secara mutlak dengan kata lain menerima sebagian dan menolak sebagian.

³⁸ Mukhtar Yahya & Fatchur Rahman, *Op.Cit.* h.348

1. Kelompok yang menggunakan Saddu azd Dzari`ah sebagai sistem instimbat hukum dalam Islam. Fuqaha yang memakai sebagai sumber istimbat hukum adalah fuqaha mazdhab Maliki dan mazdhab Hambali.³⁹ Mereka berdalih berdasarkan surat al An`am ayat 108.⁴⁰ Bahkan ulama-ulama mazhab Malikiah telah mengembangkan metode ini dalam berbagai persoalan fiqiah dan ilmu ushul fiqih dalam mazhab mereka. Sehingga dalam pemakaiannya berlaku sangat luas. Seperti Imam al Qarafi telah mengembangkan metode sadd Dzari`ah ini dalam karya bukunya berjudul “*Anwar al Buruq fi Anwa` al Furuq*”. Demikian juga Imam as Syatibi telah mengembangkan metode Saddu az Dzari`ah ini yang ditulis dalam bukunya al Muwafaqat.⁴¹

Dalam mazhab Hambali Imam Qudamah mengatakan”Dzari`ah itu digunakan sebagaimana dalil-dalil yang lain telah diberikan sebelumnya” selain itu Ibnu Taimiyah yang merupakan tokoh mashab Hambali juga mengatakan”sesungguhnya Allah SWT menutup Dzari`ah yang menuju kepada yang haram, sesungguhnya dia yang mengharamkannya , maka dia yang melarangnya. Ibnu Qayyim mengatakan” Bab Saddu Dzari`ah merupakan satu dari seperempat taklif. Al Zarkasi juga mengatakan” Dzari`ah itu dapat diterima sebagai ushul. Dari semua imam mazhab dan para fuqahnya yang dikemukakan diatas dapat ditarik suatu keimpulan bahwa semua fuqaha mazhab Maliki dan Hanbali menerima dzari`ah sebagai salah satu metode

³⁹ *Ibid.* h.138

⁴⁰ Isi kandungannya tentang adanya larangan untuk mencaci maki sesembahan agama orang lain, dan dikhawatirkan dia akan mencaci mak Allah sesembahan orang muslim.

⁴¹ Hifdhotul Munawaroh. *Op. Cit.* h.73

istimbat hukum bahkan memperluasnya. Sebagaiman Ibnu Taimiyah dalam bukunya Majmu` Fatwa li Ibnu Taimiyah.⁴²

2. Kelompok yang menolak sepenuhnya sebagai satu metode Istimbat hukum yaitu para fuqaha adalah Ibnu Hazm dan Ulama Dzahiriyah

⁴²Ibrahim bin Mahna bin Abdilahi bin Mahanna. *Op.Cit* h.70-74

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pengkajian terhadap pernikahan dari perspektif saddu zar`iyah maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum nikah misyar. Sebagian menghalalkan dan sebagian yang lainnya mengharamkan. Adapun dasar yang membolehkan adalah karena dalam prakteknya nikah misyar telah terpenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syari`at. Adapun yang mengharam nikah misyar beralaskan bahwa dalam nikah tidak hanya terpenuhi syarat dan rukunnya saja tetapi harus juga tercapainya maqashid syar`iyah dari nikah.
2. Berdasarkan Saddu Dzari`ah bahwa praktek nikah misyar terdapat manfaat dan madharat dalam pelaksanaannya, karena banyaknya dampak negatif yang akan ditimbulkannya maka nikah misyar harus dicegah (dihindari),
3. Nikah misyar bisa dilakukan orang-orang tertentu dan dalam situasi darurat (terpaksa) dan kondisi masyarakat tertentu pula.
4. Nikah Misyar bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan dan bertentangan juga hukum positif Indonesia. yaitu UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI

B.Saran

Pertama: Sebagai kesinambungan dan kesimpulan, penulis pertama sangat mengharapkan saran-saran, koreksi dan kritikan dan segenap pembaca thesis ini. Saran dan koreksi tersebut penulis butuhkan demi perbaikan – perbaikan pada isi thesis ini.

Kedua; Penulis juga berharap seluruh pembaca untuk menyadari dan mensosialisasikan bahwa didalam Islam ada pemikir kontemporer yang memiliki pendapat yang berbeda dengan ulama-ulama salaf, oleh karena itu setiap perbedaan untuk dapat dijadikan bahan kajian yang akan datang.

Ketiga: penulis juga berharap para peneliti dapat melakukan penelitian dari sudut pandang yang lain sehingga bisa menghasilkan penemuan-penemuan baru di dalam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur‘an Al-Karim.

Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih (Semarang: Dina Utama 1994)

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayed Hawwas, *al Usroh wa ahkamimuha fii at Tasyri al Islam*, terj. Abdul Majid Khon. (Jakarta; Amzah 2017)

Abdurrahman, *KHI di Indonesia*, Jakarta: Akademia Pressindo, 1994.

Abidin, Slamet, *Fiqih Munakahat*, (Bandung Pustaka Setia, 1999).

Abdul Aziz M Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *al Usrah wa akhamuha fii at tasyrii al Islam*. (terjm) Abdul Majid Khon “Fiqih Munakahat” (Jakarta; Amzah 2009).

Ahmad Subail, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Terhadap Fatwa Yusuf AlQardawi Tentang Nikah Misyar)*, Al-Ahwal Al-Syakhsyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2013

Alaidin Kotto Prof. Dr. Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)

Al-Ghazali, *Adab al-Nikah*, (Bandung : Kharisma, 1997).

Amir Mu‘allim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media)

Akbar, Husaini Usmandan Purnomo Setiady, *Meode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

Al-Anshary, Abu Yahya Zakariya, *Fath al-Wahhab*, (singapura : Sulaiman Mar‘iy) al-Bājurī, Syaikh Ibrāhīm, *Al-Bajurī „Ala Ala Fath al-Qarib Li Abi Suja”*, Juz. II, (Semarang: Hikmah Keluarga, t.t.).

Djaelani, Abdul Qodir, *Peran Ulama dan Santri dalam perjuangan Politik Islam Di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990).

Ibnu Manzhur, *Lisan al `Arab*, Juz 3 (Kairo, Dar al Ma`rifah, t.th)

Ibnu al Humamam , *Syarah Fath al Qadir*, (Kairo; Mustafa al Babi al halabi 1970)

Imam Taqiuddin Abubakar, *Kifayatul Akhyar* juz II (Semarang; Thoha Putra t.th)

Jalal al Dien al mahally, *Syarah minhaj al thalibin*, jilid III (Mesir: Dar al Kutub al Kubro .1996)

Jalaluddin al Mahalli Juz III (Indonesia: Nur asia, 2006)

Hariri Abdurrahman, *Fiqh `Ala Madzahib al `Arba`ah*, Beirut Libanon; Ihya at Taurat al `Arabi 1969.

Harisatul Mukaromah, *Pandangan Aktivis gender Ponorogo Terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardawi*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2011). Marzuki, *Metodologi Riset* (BPFE-UII, 1995).

Moh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005).

Muhammad, Husein, *Fikih perempuan*, (Lkis : Yogyakarta, 2007).

Mukaromah, Harisatul, *Pandangan Aktivis gender Ponorogo Terhadap Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardawi*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016.

Mardani Dr, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Jogjakarta: Graha Ilmu,

Nasrun Haroen. Prof. Dr Ushul Fiqih (Jakarta: Jakarta Logos Wacana Ilmu, 1997)

Sumardi Surya Brata, *Meode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, tahun 1992) Sumardi Surya Brata, *Meode Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, tahun 1992)

Rahman, Doi, *penjelasan lengkap hukum-hukum Allah (Syariah)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005).

Subail, Ahmad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Misyar (Studi Terhadap Fatwa Yusuf Al-Qardawi Tentang Nikah Misyar)*, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo Yogyakarta, 2013.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermassa, 1996.

Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Penunjuk praktis Untuk Peneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006).

Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya: Usaha Nasional).

Qardhawi, Yusuf, *Zawajul Misyar haqiqatuhu wa hukmuhu*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1999).

Syakir, Muhammad Fuad, *Perkawinan Terlarang*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2002).

Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Prenada Media, 2006).

Ummu Isfaroh Tiharjanti, *Penerapan Saddu Zara'i terhadap Penyakit GenitikanKarier dan Perkawinan Inbreeding*(Yogyakarta:Uin Kalijaga 1998)

UU No.1 Tahun 1997 tentang Perkawinan. Pasal 1

Yusuf al Duraywish, al Zawaj al `Urf (Riyadh:Dar al Asimah t.t)

Yahya, Imam. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, 2009.

Wahbahab al Zuhaili jilid VII h.6533

Zulkifli, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.

Zuhaily, Muhammad, *al-Mu'tamad Fi Al-Fiqh Al-Shafi'i*, terj. Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Pernikahan Dalam Perspektif Madzhab Shafi'i, Mohammad Kholison (Surabaya : CVImtiyaz, 2013).

Zulkifli, *Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*, Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الإسلامية



CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name : Arifin
ID Number : 21890211625
Date of Birth : September 04, 1975
Sex : Male
Test Form : Paper Based Test

Achieved the following scores on the

English Proficiency Test

Listening Comprehension	: 54
Structure & Written Expressions	: 60
Reading Comprehension	: 54
Overall Score	: 560

Expire Date : April 13, 2021



The Head of Language Development Center

Mahyudin Syukri, M. Ag
NIP. 19720421 200604 1 003



The Certificate of Language Development Center
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
English Proficiency Test Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
The scores and information presented in this score report are approved.
Address : Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004
Telp. 0852 7144 0823 Fax. (0761) 858832
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info



LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الحكومية الإسلامية

SERTIFIKAT
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA

Arifin

Nomor ID : 21890211625

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal Lahir : 4 September 1975

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية

37 : الاستماع
38 : القواعد
53 : القراءة
427 : النتيجة

Berlaku Hingga : 21 April 2021

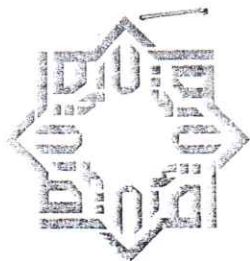


Arabic Proficiency Test Certificate Provided by
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
The scores and information presented in this score report are approved.

Address : Jl. K11, Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP: 0852 7144 0823
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

M. Syukri, M. Ag

The Head of Language Development Center



UIN SUSKA RIAU

Repository : uin-suska.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PROGRAM PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Nomor : 2471/Un.04/PPs/PP.00.9/2019
Lamp. : 1 berkas
Perihal : Izin Melakukan Kegiatan Penelitian Tesis

Pekanbaru, 22 Oktober 2019

Kepada Yth.
Kepala Perpustakaan Program Pascasarjana UIN
Suska Riau
Di
Pekanbaru

Dengan hormat,
Dalam rangka penulisan tesis, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk mengizinkan mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama	: Arifin
NIM	: 21890211625
Program Pendidikan	: Magister (S2)
Program Studi	: Hukum Keluarga
Konsentrasi	: Hukum Keluarga
Semester	: IV (Empat)
Judul Tesis	: Nikah Misy Ar Perspektif Saddu Az Zar'iah

untuk melakukan penelitian sekaligus mengumpulkan data dan informasi yang diperlukannya dari Perpustakaan Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih:

Wasalam
Direktur,



Prof. Dr. Afrizal M, MA

NIP. 19591015 198903 1 001

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	8/7-2019	Perbaikan Proposal	B	
2.	5/8-2019	Pengumpulan Literatur & Referensi	B	
3.	20/9-2019	Perbaikan Rumusan Masalah	B	
4.	16/10-2019	Revisi Angket & Daftar	B	
5.	22/11-2019	Revisi Analisis Masalah	B	
6.	11/12-2019	Pengumpulan	B	

Catatan :
*Coret yang tidak perlu
Pekanbaru, 20....

Pembimbing I / Promotor *

Amur

Dr. Helmi Bani

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS / DISERTASI *

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Co Promotor	Keterangan
1.	8/7-2019	Revisi Kerangka Penelitian	A	
2.	10/8-2019	Revisi Teori Penelitian	A	
3.	20/9-2019	Revisi Rumusan Masalah	A	
4.	16/10-2019	Revisi Gambar & Penalaran	A	
5.	20/11-2019	Pengumpulan Masalah	A	
6.	18/12-2019	Pengumpulan	A	

Catatan :
*Coret yang tidak perlu
Pekanbaru, 26-12-2019

Pembimbing II / Co Promotor *

Dr.

Amur
Muhammad, 11/11/19

Biodata Penulis



Arifin adalah sebuah nama yang diberikan oleh ayah dan ibunya disaat dia dilahirkan di sebuah Desa Lengkong yang berada di kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu tang 04 September 1975. Penulis adalah adalah anak yang ketiga dari lima bersaudara. Pendidikan Sekolah Dasar dilaksanakan di Desa Tani Makmur.

Kemudian melanjutkan ke MTS Al Ikhsan Buluh Rampai Kec. Seberida. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat pertama, lalu melanjutkan kependidikan atas di Madrasah Aliyah PAIR Rengat hingga selesai tahun 1995. Jenjang perguruan tinggi dilaksanakan di UIN SUSQA Pekanbaru Fakultas Syari'ah Jurusan Jinayah siasah yang sekarang berubah menjadi UIN SUSKA Riau, dan selesai tahun 2000.

Karir Pekerjaan yang pernah dilakukan diantaranya sebagai guru di MTS YMI Inecda sampai tahun 2008. Pekerjaan sekarang adalah sebagai Pengawai Negeri Sipil di lingkungan di Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu. Pengabdian sebagai penghulu diawali di KUA Kec. Lubuk Batu Jaya selama 3 tahun, lalu pindah ke KUA Kecamatan Pasir Penyu dan mengabdikan selama 8 tahun. Lalu pindah tugas lagi di KUA Kecamatan Rengat Barat tahun 2019 sampai sekarang sebagai Kepala KUA.

Organisasi yang pernah di jabat:

1. IKMI (Iktan Keluarga Masjid Indonesia) Inhu sebagai Kepala Seksi Pendidikan Masyarakat priode 2018-2021.
2. NU (Nahdhatul Ulama) PC.Inhu sebagai wakil khatib 2019-2024.
3. IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) sebagai Pembina priode 2019-2024.
4. APRI (Asosiasi Penghulu Republik Indonesia) sebagai sekretaris priode 2018-2020.

Adapun karya tulis ilmiah yang pernah ditulis adalah:

1. Peranan KUA dalam membentuk masyarakat Agamis di Kecamatan Pasir Penyu tahun 2017
2. Peranan KUA dalam membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah
3. Imamah menurut Khawarij
4. Nikah Misyar perpektif Saddu Dzari'ah
5. Menjadikan KUA sebagai pelayanan Prima